

PENGEMBALIAN HARTA *SESAN* DAN *UANG JUJUR*
DALAM PERKARA PERCERAIAN PERSFEKTIF HUKUM ISLAM
(Analisis Putusan No.1155/Pdt.G/2016/PA.Gsg.)



Tesis

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan
Menyelesaikan Program Magister Jurusan Hukum Keluarga Islam

Oleh:
ARYA M. NURKHOLIS
NPM : 1774130002

PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1442H/ 2021M

PERNYATAAN ORISINALITAS / KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ARYA M. NURKHOLIS**
NPM : **1774130002**
Program study : **Ilmu Syari'ah**
Jurusan : **Hukum Keluarga Islam**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang saya berjudul ;
“PENGEMBALIAN HARTA *SESAN* DAN *UANG JUJUR* DALAM
PERKARA PERCERAIAN PERSFEKTIF HUKUM ISLAM (Analisis Putusan
No.1155/Pdt.G/2016/PA.Gsg.)“, adalah benar karya asli saya, kecuali yang
disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan sepenuhnya
menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Bandar Lampung, 27 Agustus 2020

Yang menyatakan

ARYA M. NURKHOLIS

ABSTRAK

Hakim dan putusan bak dua sisi keping uang yang tak bisa dipisahkan. Kemampuan dan kualitas hakim dalam memutus perkara tercermin dari putusannya. Dalam suatu keputusan Hakim, pertimbangan hukum (*rechtsgronden*) akan menentukan nilai dari suatu putusan hakim sehingga aspek pertimbangan hukum oleh hakim harus disikapi secara, teliti, baik, dan cermat. Pada putusan Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih No.1155/ Pdt.G/ 2016/ PA.Gsg. berisi permohonan talak yang mengabulkan gugatan rekonsvansi tentang pengembalian sesan serta ditolaknya permohonan pengembalian uang jujur.

Permasalahan yang akan dikaji dalam tesis ini adalah : 1.Bagaimana Pertimbangan hakim dalam pengembalian sesan dan uang jujur pada putusan No.1155/Pdt.G/2016/PA.Gsg.? 2.Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengembalian sesan dan uang jujur pada putusan No.1155/Pdt.G/2016/PA.Gsg.? Adapun penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif pustaka. Jenis metode penelitian yang digunakan penulis yaitu metode deskriptif untuk mendeskripsikan Fakta-fakta hukum di persidangan dalam memutus perkara perceraian yang mengabulkan pengembalian sesan dan menolak pengembalian uang jujur dalam putusan No.1155/ Pdt.G/ 2016/ PA.Gsg.dan peneliti menggunakan metode deduktif, induktif dan metode perbandingan dalam menganalisa data. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang mana menitikberatkan perilaku masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. diperoleh dari putusan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Gunung Sugih.

Hasil dari penelitian ini adalah, bahwa Hakim dalam memutus perkara perceraian no. No.1155/Pdt.G/ 2016/PA.Gsg. tentang pengabulan pengembalian harta *sesan* dan penolakan pengembalian *uang jujur* telah sesuai dengan syariat islam. Pada penelitian ini peneliti mengqiyaskan pengembalian *uang jujur* dengan pengembalian Mahar, yang mana apabila terjadi perceraian dan pihak suami yang meminta cerai, maka istri tidak berkewajiban untuk mengembalikan mahar tersebut. Maka keputusan hakim yang menolak mengabulkan uang jujur sesuai dengan syariat islam.Pengembalian harta sesan dalam perkara perceraian dilihat dari salah satu Maqoshid syar'inya yaitu Hifzu Mal yang termasuk dalam kategori kategori Maslahat Hajiyat yang berada di bawah Dhoruriyyat dan Tahsiniyat, karena dalam pengembalian *harta sesan* tersebut dapat menjadi Maslahat bagi pihak termohon maupun anaknya.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA (PPS)**

Jl. Yulius Usman Labuhan Ratu Kedaton Bandar Lampung (35142) Telp/Fax. (0721) 787392

PERSETUJUAN

Judul Tesis

**PENGEMBALIAN HARTA SESAN DAN UANG
JUJUR DALAM PERKARA PERCERAIAN
PERSFEKTIF HUKUM ISLAM (Analisis Putusan
No.1155/Pdt.G/2016/PA.Gsg.)**

Nama

ARYA M. NURKHOLIS

NPM

1774130002

Program Study

Ilmu Syari'ah

Jurusan

Hukum Keluarga Islam

**Telah Disetujui Untuk Diajukan Dalam Ujian Terbuka Pada Program
Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung**

Bandar Lampung, Maret 2021

Tim Penguji

Ketua

: Prof. Dr. H. Idham Khalid, M.Ag

Penguji I

: Prof. Dr. Faisal, S.H., M.H.

Penguji II

: Dr. Hj. Zuhraini, SH., M.H.

Penguji III

: Dr. Agus Hermanto, M.H.I.

Sekretaris

: Eko Hidayat, M.H.

Tanggal Lulus Ujian Tertutup : 11 November 2020



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA (PPS)**

Jl. Yulius Usman Labuhan Ratu Kedaton Bandar Lampung (35142) Telp/Fax. (0721)787392

PERSETUJUAN

Judul Tesis

**PENGEMBALIAN HARTA SESAN DAN UANG
JUJUR DALAM PERKARA PERCERAIAN
PERSFEKTIF HUKUM ISLAM (Analisis Putusan
No.1155/Pdt.G/2016/PA.Gsg.)**

Nama

ARYA M. NURKHOLIS

NPM

1774130002

Program Study

Ilmu Syari'ah

Jurusan

Hukum Keluarga Islam

**Telah Disetujui Untuk Diajukan Dalam Ujian Terbuka Pada Program
Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung**

Bandar Lampung, Maret 2021

Tim Penguji

Ketua

: Prof. Dr. H. Idham Khalid, M.Ag

Penguji I

: Prof. Dr. Faisal, S.H., M.H.

Penguji II

: Dr. Hj. Zuhairini, SH., M.H.

Penguji III

: Dr. Agus Hermanto, M.H.I.

Sekretaris

: Eko Hidayat, M.H.

Tanggal Lulus Ujian Tertutup : 11 November 2020



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA (PPS)**

Jl. Yulius Usman Labuhan Ratu Kedaton Bandar Lampung (35142) Telp/Fax. (0721)787392

PENGESAHAN

Tesis yang berjudul **PENGEMBALIAN HARTA SESAN DAN UANG
JUJUR DALAM PERKARA PERCERAIAN PERSFEKTIF HUKUM ISLAM**

(Analisis Putusan No.1155/Pdt.G/2016/PA.Gsg.), ditulis oleh: **Arya M.
Nurkholis, NPM:1774130002** telah diujikan dalam ujian terbuka pada Program
Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.

Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. H. Idham Khalid, M.Ag : (.....)

Penguji I : Prof. Dr. Faisal, S.H., M.H. : (.....)

Penguji II : Dr. Hj.Zuhraini, SH., M.H. : (.....)

Penguji III : Dr. Agus Hermanto, M.H.I. : (.....)

Sekretaris : Eko Hidayat, M.H. : (.....)

**Direktur Program Pascasarjana
UIN Raden Intan Lampung**



**Prof. Dr. H. Idham Kholid, M.Ag.,
NPM:17610201988031005**

Tanggal Lulus Ujian Terbuka : Maret 2020

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ (الروم: 21)

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Ar-rum:21)



RIWAYAT HIDUP

Arya M. Nurkholis, lahir di Bandar Lampung 31 Mei 1995 merupakan anak kedua dari empat bersaudara, putra dari Bapak Edy Mawan dan Ibu Siti Hasni, S.Pd.I . Menempuh pendidikan pertama di RA Ismaria Al-Qur'aniyyah dan lulus pada tahun 2001, melanjutkan pendidikan di SDN 1 Rajabasa Raya dan lulus pada tahun 2007, dan melanjutkan pendidikan SMP & SMA di Pondok Modern Darussalam Gontor lulus pada tahun 2013, dan melanjutkan pendidikan jenjang pendidikan strata satu (S1) di Universitas Darussalam Gontor dengan mengambil jurusan Perbandingan Mazhab di Fakultas Syari'ah lulus pada tahun 2017, kemudian melanjutkan pendidikan strata dua (S2) di Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung dengan prodi Hukum Keluarga Islam dan lulus pada tahun 2021.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, berkah dan anugerahnya, penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul ; Pengembalian Harta *Sesan* Dan *Uang Jujur* Dalam Perkara Perceraian Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan No.1155/Pdt.G/ 2016/PA.Gsg.), dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum bidang Hukum Keluarga Islam pada Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.

Berbagai kendala dan proses yang penulis lewati demi upaya tercapainya penyelesaian Tesis ini, yang tentunya Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak terlepas dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh sebab itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung; Prof.Dr.H.Moh Mukri, M.Ag., beserta jajarannya.
2. Direktur Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung; Prof.Dr.H.Idham Kholid, M.Ag., beserta jajarannya.
3. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam PPs S2 Dr. H.Iskandar Syukur, M.A., terimakasih atas arahan motivasi dan bimbingannya yang sangat membantu penulis dalam penyelesaian tesis ini.
4. Pembimbing I dan Pembimbing II; Dr.Hj. Zuhriani, SH.MH dan Dr. Agus Hermanto, M.H.I., yang telah memberikan bimbingan dan pengarahannya kepada penulis.
5. Penguji Utama, Prof. Dr. Faisal, S.H., M.H., yang telah memberikan bimbingan dan pengarahannya kepada penulis.
6. Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga, Eko Hidayat, S.Sos.,MH dan Kasubbag TU PPs, Supriyadi, S.Sos, beserta seluruh staf Akademik dan Tata Usaha PPs UIN RadenIntan Lampung.
7. Papa dan Mamaku, Edy Mawan dan Siti Hasni, S.Pd.I atas bantuan moril dan materiil serta doa – doa mereka yang tak pernah putus.
8. Kakak dan Adikku, Sherly Dyah Sylviana, S.Pd., Dewi Sekarwati, S.Si dan Anugrah Nur yang telah banyak memberikan motivasi serta dorongan dalam penyelesaian Tesis ini.

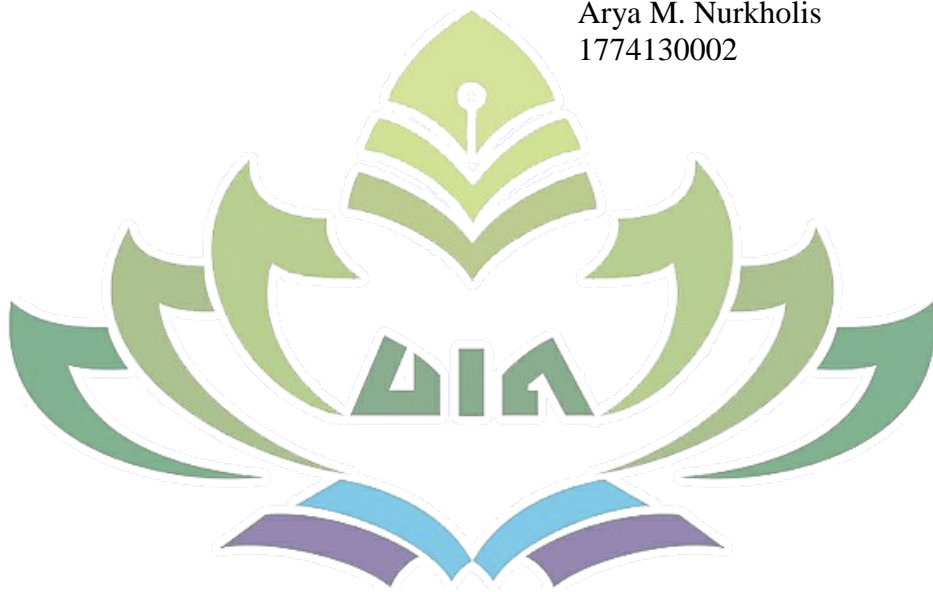
9. Sahabat-sahabat terbaik, Agung Prawoto, M.Pd., Saipul Nasution, M.A., Ulul Azmi, M.H., Maria Ulfa, M.H., Nikita Dian Paranti, M.Pd., yang telah mendukung dalam proses penyelesaian tugas akhir ini.

Harapan penulis semoga tesis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan berguna bagi pembaca. Aamiin.

Bandar Lampung, 27 Agustus 2020

Penulis,

Arya M. Nurkholis
1774130002



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
ا	Tidak Dilambangkan	ط	T
ب	B	ظ	Z
ت	T	ع	‘
ث	S	غ	G
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Z	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	‘
ص	S	ي	Y
ض	D		

Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Huruf dan tanda
ا-ي	Ä
ي -	Í
و -	Ů

Pedoman transliterasi ini di modifasikan dari: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan, Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Proyek pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, Jakarta, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
PERNYATAAN ORISINALITAS / KEASLIAN	ii
ABSTRAK	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG TERTUTUP	iv
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG TERBUKA	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
DAFTAR ISI	xii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Kegunaan Penelitian	6
F. Kajian Pustaka	6
G. Metode Penelitian	9
H. Kerangka Teori	13
 BAB II LANDASAN TEORI	 21
A. Harta Kekayaan dalam Perkawinan	21
1. Pengertian Harta Kekayaan dalam Perkawinan.....	21
2. Macam-macam Harta Kekayaan dalam Perkawinan	24
3. <i>Sesan & Uang Jujur</i>	29
B. Perceraian (<i>Talak</i>) dan Gugat (<i>Khulu'</i>) dalam Hukum Islam	35

BAB III	PENYAJIAN DATA	48
	A. Gambaran umum Pengadilan Agama Gunung Sugih	48
	1. Sejarah Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B	48
	2. Visi dan Misi	50
	3. Tugas dan Fungsi	50
	B. Deskripsi Putusan No.1155/Pdt.G/2016/PA.Gsg.	54
	1. Duduk Perkara	54
	2. Pertimbangan Hakim	57
	a. Dalam Konvensi	57
	b. Dalam Rekonvensi	64
BAB IV	ANALISIS DATA	71
	A. Pertimbangan Hakim dalam pengembalian harta sesan dan uang jujur dalam perkara perceraian No. No.1155/Pdt.G/2016/PA.Gsg.	71
	1. Alasan terjadinya perceraian pada putusan No.1155/Pdt.G/2016/PA.Gsg.	71
	2. Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan pengembalian <i>sesan</i>	73
	3. Pertimbangan Hakim dalam menolak pengembalian <i>Uang jujur</i>	75
	B. Tinjauan Hukum Islam terhadap pengembalian harta sesan dan uang jujur pada putusan No. 1155/Pdt.G/2016/PA.Gsg.	76
BAB V	PENUTUP	84
	A. Kesimpulan	84
	B. Saran	85
	DAFTAR PUSTAKA	86
	LAMPIRAN	89

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan akad yang sangat kuat dan sakral antara laki-laki dan perempuan, yang menjadi alasan legalisasi status suami-istri dan legalisasi hubungan suami-istri. Tujuannya untuk membangun keluarga yang penuh kasih sayang, cinta dan damai. Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم: 21)

Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*
(QS. Ar-rum: 21)¹

Menurut pasal 1 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, perkawinan merupakan ikatan material dan spiritual antara laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri. Pada prinsipnya rumusan perkawinan yang dirumuskan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas mempunyai arti dan tujuan yang sama dengan rumusan perkawinan ahli / ulama.²

Dalam Pasal 35 UU No. 1 thn 1974 harta perkawinan itu terdiri dari harta bersama, harta bawaan (*sesan*), harta hadiah, harta waris.

- a. Harta bersama yaitu harta yang didapat suami istri selama perkawinan .
- b. Harta bawaan yaitu harta yang dibawa masing- masing suami istri kedalam ikatan perkawinan. Harta bawaan, harta hadiah dan harta waris ini dapat dikuasai masing masing, jika tidak ditentukan lain.

¹ Departemen Agama RI, *Al qur'an dan Terjemah*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989).

² Zuhraeni, *Sistem Perkawinan Adat Lampung*, Cetakan I (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah, 2006). h.23

Masyarakat Adat Lampung dibedakan dari yang beradat Saibatin dan beradat Pepadun, Bentuk perkawinan adat pada masyarakat yang beradat pepadun adalah berbentuk perkawinan jujur dengan menurut garis keturunan bapak (*patrilineal*) yaitu dengan adanya pemberian uang kepada pihak perempuan untuk menyiapkan *sesan*, berupa alat-alat untuk memenuhi kebutuhan keluarga, Sesan tersebut akan diserahkan kepada keluarga pengantin pria di upacara pernikahan sekaligus sebagai penyerahan (secara adat) mempelai wanita kepada keluarga /klan mempelai laki-laki. Dengan demikian, secara hukum adat, maka putus pula hubungan keluarga antara mempelai wanita dengan orangtua nya.³

Bentuk perkawinan dengan sistem jujur (sistem perkawinan yang dilakukan dengan pembayaran dengan uang atau emas) adalah perkawinan yang dilakukan dengan membayar jujur, *uang jujur* ini diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak wanita dan dengan diterimanya *uang jujur* tersebut, dengan demikian, kedudukan adalah ikut pihak suaminya, baik diri atau harta akan tunduk pada adat suaminya, dan istri tidak boleh bertindak sendiri tanpa seizin suaminya. Dalam rangka membicarakan banyaknya uang jujur yang harus diberikan oleh pihak pria kepada pihak wanita nantinya akan digunakan untuk keperluan resepsi dan juga untuk membeli barang-barang *sesan* atau barang bawaan berupa perabotan rumah tangga seperti kursi, kulkas, tempat tidur dan lain-lain. Namun *sesan* tersebut bukan semata-mata berasal dari uang jujur tapi pemberian para saudara dari pihak wanita.

Dalam tata cara dan upacara perkawinan adat pepadun yang berdasarkan perkawinan jujur yang pelaksanaannya dapat dengan cara adat *hibal serba*, *bumbang aji*, *intar padang*, *intar manom*, dan *sebambangan*. Tata cara dan ritual upacara adat ini dilakukan jika tercapai kesepakatan bersama antara pihak laki-laki dan pihak perempuan. Kemudian sesuai dengan kemampuan

³ Sabaruddin Sa, *Saibumi Ruwa Jurai Lampung Pepadun dan Saibatin*, (Jakarta: Buletin Waylima Manjau, 2012). h.72

dan kesepakatan yang dicapai kedua belah pihak maka dilakukan tata cara dan ritual adat.

Upacara pernikahan dilakukan siang hari, barang-barang bawaan pengantin wanita (*sesan*) dibawa bersama-sama ketempat penganti pria.

Tentang barang-barang yang dibawa perempuan di waktu perkawinannya pada keturunan *patrilineal* (bapak) yang kuat si suami mendapat hak atasnya, tapi di tempat lain tetap milik istri sendiri dan juga adakalanya menjadi milik bersama, Jadi barang bawaan (*Sesan*) dalam arti ekonomis terkadang merupakan suatu penggantian dari pada jujur itu.

Istilah-istilah tersebut berasal dari hukum adat yang berlaku di Indonesia saat ini. Menurut hukum adat harta perkawinan itu terdiri dari harta bawaan (Lampung : *sesan*, Jawa: *gawan*).

Kedudukan harta perkawinan tersebut tergantung pada bentuk perkawinan yang terjadi atau kesepakatannya, tapi dalam masyarakat yang bersifat patrilineal Oleh karena itu, bentuk perkawinan yang paling umum adalah perkawinan dengan pembayaran uang jujur. Semua harta yang terkandung dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama, oleh karena itu semua proses hukum terkait harta perkawinan harus dipahami dan disetujui oleh suami, dan tidak ada tindakan yang dapat diambil terhadap harta tersebut tanpa persetujuan suami. Harta bawaan dengan nilai adat adalah segalanya, tidak hanya suami yang mengontrolnya, tetapi juga kerabatnya. Andai kata terjadi perceraian maka pihak kerabat istri menuntut juga agar semua harta bawaan dikembalikan, dan kewajiban pihak istri mengembalikan *uang jujur* dan semua biaya yang dikeluarkan oleh suami dalam pernikahan.⁴

Pada harta bawaan (*sesan*) istri dalam perkawinan jujur kepemilikan harta tersebut tetap dikuasai oleh suami. Harta bawaan istri biasanya berupa barang seperti lemari, tempat tidur dan perkakas rumah tangga yang semakin lama semakin rusak atau musnah. Dengan pembayaran jujur pada saat perkawinan maka harta bawaan istri tersebut telah menjadi bagian harta kekayaan suami.

⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007). h.115

Tetapi mengenai harta yang dihibahkan oleh kerabat sebelum perkawinan dilangsungkan atau sesudah perkawinan, rupa-rupanya tetap menjadi hak milik kepada siapa hibah itu diberikan.

Dalam perkawinan semenda tidak ada harta bawaan dari suami karena suami hanya datang membawa pakaian saja. Begitu juga bila terjadi perceraian maka suami akan meninggalkan rumah tanpa membawa suatu apa pun.

Akan tetapi pada kenyataan ada putusan hakim tentang permohonan talak yang mengabulkan gugatan rekonvensi tentang pengembalian sesan serta ditolaknya permohonan pengembalian uang jujur.

Hal tersebut terdapat pada putusan Pengadilan Agama tingkat satu yaitu nomor perkara 1155/Pdt.G/2016/PA.Gsg.

Melihat fenomena diatas penulis tertarik ingin meneliti lebih lanjut tentang bagaimana pertimbangan hakim dan kajian urf terhadap putusan hakim tersebut, dengan judul *Pengembalian Harta Sesan dan Uang Jujur Dalam Perkara Perceraian Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan No. 1155/Pdt.G/2016/PA.Gsg.)*

B. Identifikasi Masalah Dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Menurut uraian latar belakang di atas, pada penelitian ini ditemui masalah :

- a. Adanya permohonan talak yang diikuti gugatan rekonvensi tentang pengembalian sesan dan uang jujur.
- b. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait sesan dan uang jujur sebagai harta bersama atau tidak.
- c. Adanya perceraian yang dilatar belakangi oleh Perselisihan yang terus-menerus.
- d. Adanya perbedaan pendapat dalam hal sesan dan uang jujur harus dikembalikan atau tidak, jikalau terjadi perceraian.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, masalah yang muncul sangatlah beragam sehingga perlu dibatasi. Batasan masalah di sini dimaksudkan untuk mempermudah pembahasan dengan memberikan pembatasan masalah secara teoritis atau objek operasional. Oleh karena itu, untuk menghindari keberagaman, peneliti membatasi penelitiannya pada pembahasan :

- a. Penjabaran tentang pertimbangan hukum dalam putusan No.1155/Pdt.G/2016/PA.Gsg.
- b. Kajian Hukum Islam terhadap pengembalian *sesan* dan *uang jujur* pada putusan No.1155/Pdt.G/2016/PA.Gsg.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan hakim dalam pengembalian *sesan* dan *uang jujur* pada putusan No.1155/ Pdt.G/ 2016/ PA.Gsg.?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengembalian *sesan* dan *uang jujur* pada putusan No.1155/ Pdt.G/ 2016/ PA.Gsg.?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan kenyataan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam pengembalian *sesan* pada putusan No.1155/Pdt.G/2016/PA.Gsg.
2. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pengembalian *sesan* pada putusan No.1155/Pdt.G/2016/PA.Gsg.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan kenyataan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

3. Mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam pengembalian *sesan* pada putusan No.1155/Pdt.G/2016/PA.Gsg.
4. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pengembalian *sesan* pada putusan No.1155/Pdt.G/2016/PA.Gsg.

F. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat membarikan informasi kepada masyarakat tentang perbedaan pendapat tentang hukum Pengembalian *Sesan* Dan *Uang Jujur* Dalam Perkara Perceraian sebagaimana yang terdapat pada Putusan No.1155/Pdt.G/2016/PA.Gsg.. Manfaat pada penelitian ini dibagi menjadi dua, yakni:

- a. Secara teori, penelitian ini bertujuan untuk menyumbangkan gagasan dalam bentuk wawasan mengenai harta pengembalian *sesan* dan *uang jujur* dalam perceraian, berupa: Pertimbangan hakim dalam Harta Pengembalian *Sesan* Dan *Uang Jujur* Dalam Perkara Perceraian Putusan No.1155/Pdt.G/2016/PA.Gsg.
- b. Secara praktis, penelitian ini sesuai dengan program studi hukum keluarga Islam, selain itu didukung mudahnya memperoleh referensi sehingga sangat membantu kelangsungan penelitian penulis.

G. Kajian Pustaka

Studi pustaka ini digunakan untuk mengetahui apakah pernah ada penelitian serupa sebelumnya, agar tidak menimbulkan duplikasi penelitian. Tema utama yang dijadikan objek pembahasan dalam penelitian ini adalah Pengembalian Harta *Sesan* dan *Uang Jujur* Dalam Perkara Perceraian Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan No. 1155/Pdt.G/2016/ PA.Gsg.). Sebelumnya masalah harta perkawinan Secara teori, telah tertulis dalam literatur, akan tetapi masalah tentang Pengembalian Harta *Sesan* dan *Uang*

Jujur Dalam Perkara Perceraian Perspektif Hukum Islam adalah penelitian yang pertama kali dikupas dan dibahas. Contoh karya ilmiah yang membahas tentang Harta perkawinan yang ada kaitannya dengan penelitian ini, adalah:

1. Tesis yang diteliti oleh Moh. Aqil Musthofa (Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta/2018) dengan judul *"Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 266/K/AG/2010 tentang Pembagian Harta Bersama Suami isteri"* dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa Pertama, dalam putusan tersebut hakim menggunakan metode penemuan hukum bebas kemudian berlanjut pada penerapan asas *contra legem*, sehingga hasil putusan pembagian harta bersama adalah bagian $\frac{3}{4}$ untuk istri, dan bagian $\frac{1}{4}$ untuk suami. Penerapan asas *contra legem* demi kemaslahatan kedua pihak yang berlandaskan pada *maqāsid asy-syari'ah*. Kedua, Keberanian hakim menyimpangi ketentuan hukum harus memperhatikan pada nilai hukum yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, bersamaan dengan pemaknaan hukum sebagai sesuatu yang selalu dalam proses menuju kesempurnaan untuk mengabdikan pada manusia.⁵
2. Tesis yang ditulis oleh Hadi Pranoto (Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang / 2015) dengan judul *"Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Terhadap Harta Perkawinan Menurut Hukum Adat (Study kasus di Pengadilan Negeri Semarang)"* dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa harta bawaan kembali kepada suami istri bila perkawinannya lebih dari 5 tahun, maka harta bawaan tersebut bercampur dengan harta bersama. Bahwa harta bersama dibagi 2 sama besar antara suami istri yang ingin bercerai tersebut. Hambatan faktor intern yaitu kurangnya kesadaran hukum dari suami istri yang bercerai dan juga faktor ekonomi. Faktor extern yaitu rumah yang merupakan harta bersama yang dibangun diatas tanah mertuanya harus

⁵ Tesis Moh. Aqil Musthofa, "Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 266/K/AG/2010 tentang Pembagian Harta Bersama Suami isteri", (2018), tersedia pada <http://digilib.uin-suka.ac.id/33891/> diakses 27 Agustus 2020.

diadakan musyawarah kalau tidak tercapai lewat lembaga yang berwenang.⁶

3. Tesis yang ditulis oleh Ahmad Jamluddin Jambunanda (Program Pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten/2019) dengan judul *“Perspektif Fiqih Kontemporer Tentang Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Dalam Asas Keadilan (Studi Kasus Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Perkara No. 126/Pdt.G/2013/PTA.JK)”*, dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa 1). Praktek di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam putusan No. 126/Pdt.G/2013/PTA.JK. pembagiannya 1/3 untuk Terbanding (suami) dan 2/3 untuk Pemanding (isteri) dengan pertimbangan harta bersama merupakan hasil jerih payah Pemanding. Terbanding masih mendapat bagian 1/3 dari harta bersama karena pertimbangan masih mengurus anak dan memberikan izin kepada Pemanding untuk bekerja. Sedangkan Pemanding mendapat 2/3 bagian harta bersama, antara lain adalah Pemanding ikut melunasi utang Terbanding yang dibawa sebelum menikah, Pemanding ikut menafkahi anak-anak dari isteri pertama Terbanding, Pemanding tidak menerima nafkah sesuai penghasilan Terbanding karena tidak ada transparansi pendapatan Terbanding. 2). Harta bersama dalam rumah tangga pada awalnya berdasarkan urf yaitu al-‘adah al-muhakamah (Adat kebiasaan bisa dijadikan sandaran hukum), yang tidak memisahkan antara hak suami dan isteri. Harta bersama dalam perkawinan dari sisi teknisnya dapat dipersamakan dengan bentuk kerjasama (syirkah) yaitu mengambil syirkah amlak dan syirkah abdan. Syirkah kepemilikan (syirkah amlak). yaitu kepemilikan bersama atas barang diantara dua orang atau lebih yang terjadi karena adanya salah satu sebab kepemilikan. Dikatakan syirkah abdan karena adanya kenyataan bahwa sebagian besar dari suami isteri dalam masyarakat Indonesia

⁶ Tesis Hadi Pranoto, “Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Terhadap Harta Perkawinan Menurut Hukum Adat (Study kasus di Pengadilan Negeri Semarang)”, (2015), tersedia pada <http://eprints.undip.ac.id/11512/> diakses 27 Agustus 2020.

bekerja sama untuk mendapatkan nafkah hidup sehari-hari dan bentuknya ialah sang suami bekerja menghasilkan uang dari usahanya dan serta isteri membantu melayaninya dan memenuhi segala kebutuhannya di rumah.⁷

Perbedaan antara peneliti penulis dengan penelitian yang telah dibahas diatas adalah sebagai berikut :

1. Pada penelitian ini penulis lebih fokus terhadap Pengembalian Harta *Sesan* dan *Uang Jujur* Dalam Perkara Perceraian Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan No. 1155/Pdt.G/2016/ PA.Gsg.).
2. Objek pembahasan dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Putusan Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih No.1155/Pdt.G/2016/ PA.Gsg.
3. Pada tesis ini, menggunakan teori *Maqashid Al-Syari'ah*.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian normatif yang mengkaji hukum perundang-undangan dari berbagai aspek seperti formalitas dan kekuatan hukum mengikat, tetapi tidak mengkaji aspek penerapan atau pelaksanaannya.⁸ Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian pustaka / penelitian pustaka. Penelitian perpustakaan adalah penelitian yang bertujuan mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan berbagai bahan yang ada di perpustakaan.⁹

⁷ Tesis Ahmad Jamluddin Jambunanda, "Perspektif Fiqih Kontemporer Tentang Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Dalam Asas Keadilan (Studi Kasus Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Perkara No. 126/Pdt.G/2013/ PTA.JK).", (2019), tersedia pada <http://repository.uinbanten.ac.id/4648/> diakses 27 Agustus 2020. (2019).

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004). H.101

⁹ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Alumni, 1986). H.33.

b. Sifat penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian analisis deskriptif, yang bertujuan untuk memecahkan solusi masalah yang ada berdasarkan data, sehingga menyediakan data, kemudian menganalisis dan menjelaskannya.¹⁰ Maksud dari penelitian deskriptif analitis adalah penelitian yang bertujuan mendeskripsikan penelitian ini secara komprehensif, rinci, jelas dan sistematis terkait analisis putusan No.1155/ Pdt.G/ 2016/ PA.Gsg. tentang pengembalian sesan.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber yang berbentuk tertulis. Data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu sumber data yang terdiri dari undang-undang, catatan hukum resmi, atau catatan pertemuan pembuatan undang-undang yang relevan dan keputusan hakim. Dalam penelitian penulis, bahan hukum utama berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KHI, dan lain lain.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu memberikan bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum dasar. Sumber data muncul dalam bentuk semua publikasi terkait hukum, seperti putusan pengadilan, selain itu juga termasuk buku-buku tentang harta bersama, dan yurisprudensi, teks dan jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar atas putusan pengadilan, dan sebagainya yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.¹¹
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan data sekunder.¹² Pada hal ini bahan

¹⁰ dan Abu Ahmani Cholid Narbuko, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997). h.44.

¹¹ Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009). h.141-142.

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke 14 (Jakarta: Rajawali Press, 2012). H.13.

hukum yang dimaksud terdiri dari kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan lain-lain.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang ada pada penelitian pustaka, penulis menggunakan beberapa tahapan, yaitu

- a. Penentuan data skunder berupa perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen hukum, catatan hukum, dan literatur bidang ilmu pengetahuan hukum
- b. Identifikasi data skunder yang diperlukan, yaitu proses mencari dan mengenal bahan hukum berupa pendapat-pendapat para pakar hukum, ketentuan pasal perundang-undangan, nomor dan tahun putusan pengadilan, nama dokumen hukum, nama catatan hukum dan judul, nama pengarang, tahun terbitan, halaman karya tulis bidang hukum, dan lain-lain.¹³
- c. Inventarisasi data relevan dengan rumusan masalah dengan pengutipan atau catatan yang berkaitan pertimbangan hakim dalam pengembalian sesan pada putusan No.1155/ Pdt.G/ 2016/ PA.Gsg.
- d. Pengkajian data yang dikumpulkan guna menentukan pertimbangan hakim dalam pengembalian *sesan* pada putusan No.1155/ Pdt.G/ 2016/ PA.Gsg.

4. Metode Pengolahan Data

Data yang terkumpul kemudian diolah, dan dilakukan beberapa cara, yakni:

- a. Pemeriksaan data (*editing*), yakni mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai/relevan dengan masalah.
- b. Penandaan data (*coding*), yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (bukuliteratur, perundang-undangan,

¹³ Abdulkadir Muhammad, *Loc. Cit.*, h.125

dokumen) pemegang hak cipta (nama penulis, tahun terbit), atau urutan rumusan masalah

- c. Rekonstruksi data (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
- d. Sistematisasi data (*systematizing*), yaitu menempatkan data menurut rangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.¹⁴

5. Teknik Analisis Data

Setelah keseluruhan data terkumpul dan diolah secara sistematis, maka selanjutnya diadakan suatu analisis secara kualitatif yaitu analisis yang tidak menggunakan model statistik dan ekonometrik atau model-model tertentu lainnya. Analisa kualitatif ini pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori-teori yang dikemukakan, sehingga dari teori-teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan. Metode analisis data menggunakan analisis kualitatif, yaitu data yang di peroleh kemudian di susun secara sistematis dan selanjutnya di analisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan di bahas. Analisis ini terbatas pada teknik pengolahan datanya.¹⁵ Proses penganalisisan dilakukan dengan cara;

a. Klasifikasi

Mengklasifikasikan data yang diperoleh dari pustaka tentang sumber-sumber yang berkaitan dengan harta bersama, yurisprudensi, dan sebagainya. Fasilitas tersebut berguna untuk untuk mengelompokkan atau mengklasifikasikan data sesuai dengan yang diperlukan dalam penelitian.

b. Verifikasi

Setelah diklasifikasikan, maka dilakukan pemeriksaan terhadap data yang diperoleh dalam rangka memperoleh pembenaran terhadap masalah yang diangkat. Verifikasi dapat diartikan sebagai pembentukan

¹⁴ *Ibid.*, h. 126.

¹⁵ Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia IKAPI, 2002). h. 98.

kebenaran teori, fakta, dan sebagainya yang dikumpulkan untuk diolah atau dianalisis agar dapat diuji secara hipotesis.

c. Analisis

Data yang diperoleh dan telah melalui tahap klasifikasi dan verifikasi, kemudian dianalisis tentang bagaimana pertimbangan hukum dalam putusan No.1155/ Pdt.G/ 2016/ PA.Gsg.dan No.0010/ Pdt.G/ 2017/ PTA.Bdl.

I. Kerangka Teori

Bagian ini berisi konseptual atau teori-teori yang akan diterapkan atau diuji dalam penyelesaian tesis, serta konsep operasional sebagai dasar pelaksanaan penelitian.¹⁶

Kerangka teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis artinya mendudukan masalah penelitian yang telah dirumuskan didalam kerangka teoritis yang relevan, yang mampu menerangkan masalah tersebut.¹⁷ Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis si penulis mengenai kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan dan pegangan teoritis. Pada penelitian ini, penulis memakai teori tentang *Maqashid Al-Syari'ah*.

1. Maqashid Al-Syari'ah

a. Pengertian *Maqashid Al-Syari'ah*

Secara bahasa *maqashid* berasal dari gabungan (*idhafah*) kata majemuk antara *Maqashid* dan *al syariah*, *Maqashid* secara bahasa adalah jamak dari *maqshad*, dan *maqsad mashdar* dari *fi'il qashada*, dapat dikatakan: *qashada-yaqshidu-qashdan-wamaksa dan, al qashdu dan al maqshadu* artinya sama, beberapa arti *al qashdu* adalah: *al i'timad: berpegang teguh, al amma: condong, mendatangi sesuatu dan*

¹⁶ Wan Jamalludin, *Pedoman Penulisan Proposal Dan Tesis*, (Bandar Lampung, 2010). h. 3.

¹⁷ Made Wiratha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Sekripsi Dan Tesis*, (Yogyakarta: Andi, 2006). h.6.

menuju. Sedangkan *syari'ah* secara bahasa berarti: tempat menuju ke sumber air.¹⁸

As Syatibi tidak mengemukakan definisi secara spesifik tentang *maqashid syariah* disebabkan karena masyarakat umum sudah memahaminya baik langsung maupun tidak langsung.¹⁹ Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili, menyebutkan *maqashid syariah* adalah sejumlah makna atau sasaran yang hendak dicapai oleh syara' dalam semua atau sebagian besar kasus hukumnya. Atau ia adalah tujuan dari syari'at, atau rahasia di balik pencanangan tiap-tiap hukum oleh *Syar'i* (pemegang otoritas syari'at, Allah dan Rasul-Nya).²⁰

Penekanan *maqasid syari'ah* bertitik tolak dari kandungan ayat-ayat al-Qur'an yang menunjukkan bahwa hukum-hukum Allah mengandung kemaslahatan. Seperti firman Allah Swt dalam al-Qur'an:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya : "Dan tiadalah Kami mengutusmu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam".²¹

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya : "Dan dalam kisah itu terdapat (jaminan kelangsungan) hidup bagi kamu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa".²²

Maqasid syari'ah adalah sebagai upaya untuk menegakkan masalah (kemaslahatan) sebagai tujuan hukum. Masalah adalah suatu yang bersifat keduniaan dan keakhiratan. Gagasan *maqasid syari'ah* pertama kali dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab ushul fiqhnya, *Al-Mustasyfa* Namun konsep *maqasid syari'ah*

¹⁸ Yudian W Asmin, *Maqasid al-Syari'ah sebagai Doktrin dan Metode*, (Jurnal Al-jami'ah No. 58, 1995). h. 23.

¹⁹ *Ibid.* h. 24.

²⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid I (Jakarta: Gema Insani, 2011). h. 678.

²¹ Departemen Agama RI, *Loc.Cit.*, h. 512.

²² *Ibid.*, h. 7.

dikembangkan secara komprehensif oleh Asy-Syatibi dalam kitabnya *Al-Muwafaqat fi Usul as-Syari'ah*.²³ Pada pandangan As-Syatibi, Allah menciptakan syariat dengan tujuan untuk merealisasikan maqasidnya untuk manusia yaitu untuk memberikan kebaikan (*maslahah*) kepada mereka dan menolak keburukan (*mafsadah*) yang menimpa mereka. (*jalbil masholih wa da f'il madhorroh*). Menurut as-Syatibi, Maqasid Syari' terbagi empat bagian :

- 1) Tujuan Syari' (Allah) menciptakan Syariat .
- 2) Tujuan Syari' (Allah) menciptakan Syariat untuk difahami.
- 3) Tujuan Syari' (Allah) menjadikan Syariat untuk dipraktikkan.
- 4) Tujuan Syari' (Allah) meletakkan mukallaf di bawah hukum Syara'.²⁴

b. Masalah dalam Maqashid Syari'ah

Maslahat sebagai substansi dari *maqashid syari'ah* dapat dibagi sesuai dengan tinjauannya.

Pertama bila dilihat dari aspek pengaruhnya dalam kehidupan manusia, masalah dapat dibagi menjadi tiga tingkatan :

1) Kepentingan Asas (*al-Dharuriyyat*)

Yaitu segala apa yang paling penting dalam kehidupan manusia, bagi tujuan kebaikan agama dan kehidupan di dunia dan akhirat karena kehidupan manusia akan rusak di dunia atau di akhirat jika kepentingan asas ini tidak ada atau tidak dipenuhi.

Sehingga dalam syariat dikenal dengan *al dharuriyyat al khamsah* (lima hal yang sangat penting) di antaranya adalah :

a) Agama (الدين)

Syariat mewujudkan agama dengan syarat dan rukunnya dari mulai iman, akidah, Dasar – dasar ibadah seperti shalat,serta

²³ Yudian W Asmin, *Loc.Cit.*, h. 98.

²⁴ *Ibid.*, h. 15.

menjaga agama dengan mensyariatkan dakwah, kewajiban berjihad, amar makruf dan nahi mungkar.

b) Jiwa (النفس)

Syariat mewajibkan menjaga jiwa, menghindari hal – hal yang berbahaya bagi jiwa manusia.

c) Akal (العقل)

Tujuan syari'ah untuk menjaganya akal, menjauhi diri dari hal-hal yang merusak akal manusia.

d) Keturunan (النسب)

Disyariatkan menikah untuk memperbanyak keturunan, menjauhi zina, menjaga keturunan dengan membekali mereka ilmu, aqidah dan akhlak.²⁵

e) Harta (المال)

Syariat membolehkan segala jenis muamalah yang sesuai dengan kaidah, berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup, menjaga harta dari kehilangan, merugi, membersihkan zakat dengan infaq, zakat atau sedekah.

2) Kebutuhan Biasa (*al-Hajiyat*)

Ia merupakan keperluan hidup untuk memudahkan kehidupan di dunia dan akhirat, tanpanya kehidupan manusia akan menjadi tidak sempurna dan mengalami kesempitan. Beberapa kebutuhan yang dibolehkan oleh syariat adalah:

Syariat membolehkan rukhsah adalah ibadah untuk memudahkan kesulitan yang terjadi dalam melaksanakan perintah. Dalam muamalah, syariat membolehkan jual beli yang merupakan pengecualian dari kaedah umum jual beli, seperti *salam, ijarah, dan muzaraah*.

²⁵ *Ibid.*, h. 130.

3) Keperluan Mewah (*al-Taḥsiniyat*)

Kondisi ini merupakan kondisi pelengkap hidup manusia, sehingga manusia merasakan kenyamanan hidup. Seperti:

- a) Menutup aurat, mengenakan pakaian yang baik, bersih dan bagus ketika memasuki masjid dan ber taqarrub kepada Allah dengan melaksanakan ibadah nafilah, sedekah, shalat sunnah dan lain lain.
- b) Dalam muamalah, dilarang boros (*israf*), jual beli di atas pembelian orang lain. dalam *adat*, diajarkan cara makan dan minum yang baik
- c) Dalam *uqubah*, dilarang mutilasi dalam *qishas* dan lain lain.²⁶

Kedua adalah maslahat yang dilihat dari aspek cakupannya yang dikaitkan dengan komunitas (jama'ah) atau individu (perorangan). Hal ini dibagi dalam dua kategori, yaitu :

- 1) *Maslahat kulliyat*, yaitu maslahat yang bersifat universal yang kebaikan dan manfaatnya kembali kepada orang banyak. Contohnya membela negara dari serangan musuh, dan menjaga hadis dari usaha pemalsuan.
- 2) *Maslahat juz'iyat*, yaitu maslahat yang bersifat parsial atau individual, seperti pensyari'atan berbagai bentuk mu'amalah.

Ketiga adalah maslahat yang dipandang dari tingkat kekuatan dalil yang mendukungnya. Maslahat dalam hal ini dibagi menjadi tiga, yaitu :

- 1) Maslahat yang bersifat *qath'i* yaitu sesuatu yang diyakini membawa kemaslahatan karena didukung oleh dalil-dalil yang tidak mungkin lagi ditakwili, atau yang ditunjuki oleh dalil-dalil yang cukup banyak yang dilakukan lewat penelitian induktif, atau akal secara mudah dapat memahami adanya maslahat itu

²⁶ *Ibid.*, h. 147.

- 2) Maslahat yang bersifat *zhanni*, yaitu maslahat yang diputuskan oleh akal, atau maslahat yang ditunjuki oleh dalil *zhanni*.²⁷
- 3) Maslahat yang bersifat *wahmiyah*, yaitu maslahat atau kebaikan yang dihayalkan akan bisa dicapai, namun tidak menutup kemungkinan dalam prakteknya akan muncul madharat dan mafsadat.

c. Cara Memahami Maqashid Syari'ah

1) Syarat Maqashid Syari'ah

Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa sesuatu baru dapat dikatakan sebagai maqashid syari'ah apabila memenuhi empat syarat berikut, yaitu :²⁸

- a) Harus bersifat tetap, maksudnya makna-makna dimaksudkan itu harus bersifat pasti atau diduga kuat mendekati kepastian.
- b) Harus jelas, sehingga para fuqaha tidak akan berbeda dalam penetapan makna tersebut. Sebagai contoh, memelihara keturunan yang merupakan tujuan disyariatkannya perkawinan.
- c) Harus terukur, maksudnya makna itu harus mempunyai ukuran atau batasan yang jelas yang tidak diragukan lagi. Seperti menjaga akal yang merupakan tujuan pengharaman khamr dan ukuran yang ditetapkan adalah kemabukan.
- d) Berlaku umum, artinya makna itu tidak akan berbeda karena perbedaan waktu dan tempat. Seperti sifat Islam dan kemampuan untuk memberikan nafkah sebagai persyaratan kafa'ah dalam perkawinan menurut mazhab Maliki.²⁹

²⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Loc.Cit.*, h. 702.

²⁸ *Ibid.* h. 703.

²⁹ *Ibid.* h. 703.

2) Upaya Memahami Maqashid Syari'ah

Tiga cara yang dikemukakan oleh al-Syathibi dalam upaya memahami maqashid al-syari'ah, yaitu :³⁰

a) Menelaah dalil perintah dan larangan :

Cara pertama dilakukan dalam upaya telaah terhadap lafal perintah dan larangan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis secara jelas sebelum dikaitkan dengan permasalahan-permasalahan yang lain..

b) Menganalisis terhadap illat – illat di dalam dalil :

Cara kedua dengan melakukan analisis terhadap illat hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an atau hadis. Seperti diketahui bahwa illat itu ada yang tertulis dan ada pula yang tidak tertulis. Jika illatnya tertulis, maka harus mengikuti kepada apa yang tertulis itu, dan jika illatnya tidak tertulis, maka harus dilakukan tawaquf (tidak membuat suatu putusan). melakukan perluasan terhadap apa yang telah ditetapkan oleh nash. Perluasan terhadap apa yang telah ditetapkan oleh nash tanpa mengetahui illat hukum sama halnya dengan menetapkan hukum tanpa dalil. Kedua, pada dasarnya tidak diperkenankan melakukan perluasan cakupan terhadap apa yang telah ditetapkan oleh nash, namun hal ini dimungkinkan apabila tujuan hukum dapat diketahui. Sesungguhnya inti dari dua pertimbangan ini adalah bahwa dalam masalah muamalah dibolehkan melakukan perluasan jika tujuan hukum mungkin diketahui dengan perluasan tersebut.

c) Melihat sikap diamnya syari'

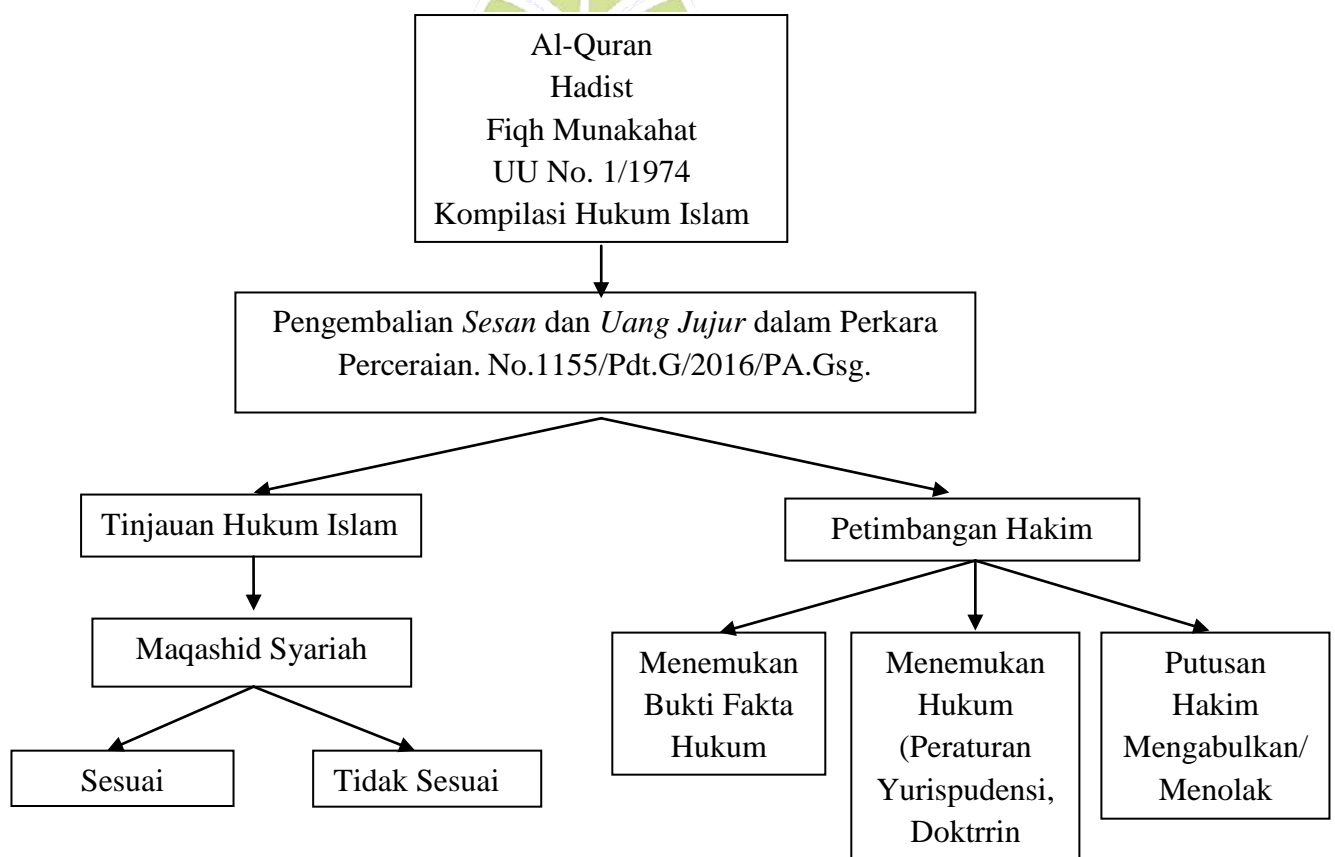
Diamnya syari' itu dapat mengandung dua kemungkinan yaitu kebolehan dan larangan. Dalam hal hal yang berkaitan dengan muamalah, sikap diamnya syari' mengandung

³⁰ Asafri Jaya, ““ Konsep Maqashid syari'ah “ Menurut al-Syathibi”, 1996., h.101.

kebolehan dan dalam hal-hal yang bersifat ibadah sikap diamnya syari' mengandung larangan. Dari sikap diamnya syari' ini akan diketahui tujuan hukum. Pengumpulan al-Qur'an yang terjadi setelah Nabi saw wafat merupakan contoh sikap diamnya syari'. dapat disimpulkan bahwa setiap maqashid yang tidak tertera dalam nash namun tidak bertentangan dengan ketentuan di atas, adalah termasuk dalam *maqashid syariah*.³¹

2. Kerangka pikir penelitian

Berdasarkan kerangka teori diatas, maka dapat disusun kerangka pikir sebagai pijakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:



³¹ *Ibid.* h. 103-109.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Harta Kekayaan dalam Perkawinan

1. Pengertian Harta Kekayaan dalam Perkawinan

Harta merupakan tonggak kehidupan rumah tangga, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat:5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (النساء : 5)

Artinya: *“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”.* (QS. An-Nisa’:5)³²

Berdasarkan ayat di atas bahwa dapat dipahami harta merupakan suatu yang sangat sakral demi berjalannya sebuah kehidupan. Hal itu disebabkan sesungguhnya harta bukan hanya untuk kepentingan duniawi saja. Akan tetapi untuk kepentingan akhirat juga. Oleh karena itu harta tidak boleh diserahkan kepada orang yang belum mampu mengatur harta, walaupun orang tersebut telah dewasa.³³ Seseorang yang telah *mukallaf* atau telah berkedudukan sebagai subjek hukum dan telah mempunyai pengetahuan (cerdas) dalam mengurus harta telah berhak memiliki harta dan tidak lagi berada di bawah perwaliannya. Dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Dia telah bebas bertindak hukum mengenai harta miliknya.

³² Departemen Agama RI, *Loc.Cit.* h. 155.

³³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang- Undang Perkawinan*, Edisi I Ce (Jakarta: Prenada Media, 2006). h. 175.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, disebutkan harta adalah barang-barang dan sebagainya yang menjadi kekayaan.³⁴ Sedangkan di dalam Kamus Hukum disebutkan bahwa harta benda adalah barang-barang kekayaan baik berupa benda tetap maupun bergerak.³⁵

Di dalam membahas pastilah ada kaitannya dengan harta yaitu segala sesuatu yang memiliki nilai, baik dalam bentuk benda bergerak atau tidak bergerak maupun berbentuk hak-hak yang nilai kebendaan atau hak-hak yang mengikuti bendanya.³⁶ Jadi yang tergolong harta adalah:

- a. Benda bergerak
- b. Benda tidak bergerak
- c. Hak yang punya nilai kebendaan
- d. Hak yang mengikuti bendanya.

Yang dimaksud perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁷

Jadi pengertian harta kekayaan dalam perkawinan atau *shirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa.³⁸

Al-quran dan hadis tidak memberi ketentuan secara tegas bahwa harta benda yang diperoleh suami istri saat ikatan perkawinan berlangsung sepenuhnya menjadi hak suami atau hak istri, namun terbatas pada nafkah yang diberikan suami. Sebagaimana dimaksud suami memiliki hartanya sendiri dan istri memiliki hartanya sendiri. Sebagai kewajiban, suami memberikan sebagian harta kepada istrinya atas nama nafkah. Selanjutnya

³⁴ Ira. M. Lapidus, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005). h. 347.

³⁵ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992). h. 160.

³⁶ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam.*, Cet. I (Jakarta: Rineka Cipta, 1992). h. 285.

³⁷ “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, n.d. h. 73.

³⁸ *Kompilasi Hukum Islam*, n.d., h.1.

digunakan istri untuk keperluan rumah tangganya.³⁹ Tidak ada penggabungan harta kecuali dengan *shirkah*, dan hal itu dilaksanakan dengan akad khusus.

Di dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa harta kekayaan suami istri bercampur ketika terjadi ikatan perkawinan. Semua kekayaan yang dibawa masing-masing dari suami istri, baik yang dibawa saat permulaan perkawinan, maupun yang mereka peroleh selama perkawinan berlangsung dicampur menjadi satu kekayaan bersama suami istri, kecuali suami istri mengadakan ketentuan lain yaitu perjanjian kawin mengenai harta kekayaan dalam perkawinan tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan memiliki peranan penting dalam kehidupan rumah tangga seseorang. Hal itu disebabkan karena harta kekayaan salah satu faktor pendukung kebahagiaan dan ketentraman dalam hubungan suami istri. Harta (uang) lah yang dapat menunjang segala kegiatan manusia, termasuk untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia (papan, sandang dan pangan).⁴⁰ Harta dalam perkawinan harus dipergunakan secara bersama-sama dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Hal itu bertujuan agar kehidupan rumah tangga berjalan semestinya. Harta benda yang dibawa ke dalam perkawinan atau yang diperoleh sendiri ketika dalam perkawinan, suami istri tetap berhak atasnya masing-masing, selebihnya adalah harta milik bersama.⁴¹ Kecuali ketika pasangan menentukan hal lain pastilah kepemilikan dan penggunaannya akan berbeda. Misalnya mereka membuat surat perjanjian kawin yang menyebutkan mengenai harta perkawinan mereka.

³⁹ Amir Syarifuddin, *Loc.Cit.* h. 175.

⁴⁰ M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003). h. 58.

⁴¹ Elise T.Sulistini dan Rudi T.Erwin, *Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara-Perkara Perdata*, Cet. II (Jakarta: Bina Aksara, 1978). h. 89.

2. Macam-macam Harta Kekayaan dalam Perkawinan

Berdasarkan atas harta kekayaan dalam perkawinan, dapat digolongkan menjadi tiga golongan:⁴²

- a. Harta Bawaan yaitu Harta masing-masing suami istri yang telah dimilikinya sebelum kawin baik diperoleh karena mendapat warisan atau usaha-usaha lainnya.

Pemilikan secara pribadi atas harta bawaan dalam Islam disimpulkan dari QS. An-nisa' ayat 32, yaitu :

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا ۚ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (النساء: 32)

Artinya: “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.(QS.An-Nisa’ 4: 32).⁴³

Kemudian Pasal 35 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 mengatakan bahwa “harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing para pihak tidak menentukan lain”.⁴⁴

Harta bawaan adalah harta yang dibawa masuk oleh masing-masing suami istri ke dalam perkawinannya.⁴⁵ Harta yang diperoleh

⁴² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, (Jakarta: Liberty, 2007). h. 99.

⁴³ *Ibid.* h. 161.

⁴⁴ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, h. 91.

⁴⁵ Gatot Suparmono, *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, (Jakarta: Djambatan, 1998). h. 46.

masing-masing sebagai hadiah atau warisan termasuk harta bawaan atau harta asal. Harta warisan yang dimaksud adalah harta atau barang-barang yang dibawa oleh suami atau istri ke dalam perkawinan yang berasal dari harta warisan orang tua untuk dikuasai dan dimiliki secara perseorangan guna memelihara kehidupan berumah tangga.⁴⁶

Mengenai harta yang diperoleh karena pewarisan, masing-masing suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum yang diatur di dalam ketentuan pasal 35 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974. Hal itu merupakan asas hukum yang diatur dalam Islam. Istri tersebut tetap memegang harta kekayaan sebagai subjek hukum atas segala miliknya sendiri.⁴⁷ Baik harta yang dibawa sendiri ke dalam perkawinan maupun yang diperolehnya sesudah perkawinan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa yang termasuk harta kekayaan masing-masing suami istri adalah:

- 1) Harta bawaan masing-masing
- 2) Harta yang diperoleh setelah perkawinan karena penghibahan dan pewarisan.

Semua harta tersebut berada di bawah “penguasaan masing-masing”. Sedangkan yang dimaksud dengan hadiah adalah harta atau barang-barang yang dibawa suami atau istri ke dalam perkawinan yang berasal dari pemberian atau hadiah para anggota atau kerabat dan mungkin orang lain karena hubungan baik.⁴⁸ Misalnya ketika melangsungkan pernikahan anggota keluarga ada yang memberikan ternak guna bekal kehidupan berumah tangga kelak. Harta bawaan juga sering disebut dengan harta asal.

⁴⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995). h. 157.

⁴⁷ R.Soetojo Prawirohadmijojo Dan Marthalena Pohan, *Sejarah Perkembangan Hukum Perceraian di Indonesia dan Belanda*, (Surabaya: Airlangga University, 1996). h. 175.

⁴⁸ *Ibid.* h. 159.

- b. Harta Pencapaian/Harta Bersama yaitu Harta yang diperoleh setelah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau salah satu pihak dari mereka

Harta bersama adalah harta yang diperoleh sesudah berada dalam ikatan perkawinan berlangsung atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang dari mereka disebut harta pencapaian. Menurut BW mulai saat perkawinan dilangsungkan, maka demi hukum terjadilah persatuan harta kekayaan suami dan istri jikalau tidak diadakan perjanjian apa-apa.⁴⁹

Namun berbeda dengan harta yang diperoleh masing-masing suami dan istri sebelum akad nikah, yaitu harta asal, atau harta bawaan. Harta asal akan diwarisi oleh masing-masing keluarganya bila pasangan suami istri itu meninggal dan tidak mempunyai anak.

Mengenai harta bersama dapat disimpulkan dari QS. An-Nisa: 34, yaitu:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ...

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka". (QS. An-Nisa' 4: 34).⁵⁰

Kekayaan yang diperoleh suami istri dari harta bawaan berupa hadiah, warisan masing-masing sebelum perkawinan merupakan modal dasar setelah perkawinan dalam usaha suami istri membentuk keluarga yang bahagia, dengan mereka berusaha mencari nafkah bersama-sama. Sehingga dapat timbul suatu harta kekayaan yang menjadi pendukung mereka dalam membangun kebahagiaan berumah tangga. Harta ini menjadi harta bersama menurut Undang-Undang

⁴⁹ Sution Usman Adji, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, Cet. II (Yogyakarta: Liberty, 2002). h. 144.

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Loc.Cit.* h. 157.

No.1 Tahun 1974 pasal 35 ayat 1, yang menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.⁵¹

Hampir semua daerah masyarakat Indonesia mempunyai pengertian, tentang harta bersama antara suami istri yang berbeda untuk masing-masing daerah.

Harta jenis ini di Aceh disebut dengan *heureuta sihareukat*, di Jawa dikenal dengan harta *gono gini* dan di Jawa Barat dikenai dengan nama *guna kaya*. Yang sering menjadi persoalan selama ini adalah penentuan tentang harta bersama ini. Sehingga banyak kasus di Pengadilan Agama tentang gugatan harta bersama mengiringi saat perceraian.

c. Harta Penghasilan

Harta penghasilan adalah harta yang diperoleh atau dikuasai suami atau istri secara perseorangan sebelum mereka menjadi suami istri.⁵² Hal itu terjadi apabila suami atau istri sebelum melangsungkan perkawinan telah menguasai atau memiliki harta kekayaan sendiri, baik berupa barang tetap maupun barang bergerak, yang didapat mereka dari hasil usaha dan tenaga fikiran sendiri, termasuk juga piutang perseorangannya.⁵³

Harta yang demikian itu bukan hanya banyak terjadi di kota-kota saja, tetapi di desa juga sering kita jumpai. Banyak orang yang belum menikah, mereka sudah memiliki penghasilan sendiri dari kerja kerasnya. Harta penghasilan ini terlepas dari pengaruh kekuasaan anggota keluarga, pemiliknya dapat melakukan transaksi sesuai kehendaknya tanpa meminta persetujuan dari anggota kerabatnya.

Harta yang diperoleh masing-masing sebelum perkawinan ini di Bali disebut dengan *guna kaya* (lain dengan *guna kaya* di Jawa Barat).

⁵¹ Moh.Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, Dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995). h. 29.

⁵² Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006). h. 106.

⁵³ Hilman Hadikusuma, *Loc.Cit.* h. 161.

Di Sumatera Selatan disebut dengan *harta pembuang* bila dihasilkan oleh perawan (gadis). Harta jenis ini tetap berada dalam penguasaan masing-masing, menurut pasal 35 ayat 2 UU No.1974.⁵⁴

- d. Hadiah Perkawinan yaitu Harta masing-masing suami istri yang diperolehnya selama berada dalam perkawinan, tetapi diperoleh bukan karena usaha mereka bersama-sama maupun sendiri-sendiri, tetapi karena diperolehnya karena hibah, warisan atau wasiat untuk masing-masing.

Hadiah perkawinan yaitu harta yang diperoleh suami istri bersama ketika upacara perkawinan sebagai hadiah.⁵⁵ Semua harta asal pemberian ketika upacara perkawinan merupakan hadiah, baik yang berasal dari kerabat maupun bukan anggota kerabat. Tetapi dilihat dari tempat, waktu, dan tujuan dari pemberian hadiah itu, maka hadiah perkawinan dapat dibedakan antara yang diterima oleh mempelai pria, yang diterima oleh mempelai wanita, dan yang diterima oleh kedua belah pihak ketika upacara perkawinan.⁵⁶

Barang-barang hadiah ini merupakan hak milik bersama yang dapat digunakan oleh kedua belah pihak tanpa mendapatkan persetujuan dari siapapun termasuk anggota keluarga. Tetapi cukup dengan persetujuan kedua belah pihak. Karena harta yang didapat oleh pengantin pada waktu pernikahan dilaksanakan, harta ini menjadi milik suami istri selama perkawinan.⁵⁷

Jenis harta yang telah disebutkan di atas adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ada empat macam harta keluarga di dalam perkawinan. Tetapi yang sering kita dengar hanya ada dua yaitu harta bawaan dan harta asal. Di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 disebutkan bahwa harta benda dalam perkawinan

⁵⁴ Moh.Idris Ramulyo, *Loc.Cit.* h. 28.

⁵⁵ Hilman Hadikusuma, *Loc.Cit.* h. 157.

⁵⁶ *Ibid.* h. 165.

⁵⁷ Abdul Manan, *Loc.Cit.* h. 107.

dibedakan menjadi dua, yaitu:⁵⁸

- 1) Harta bersama
- 2) Harta bawaan

3. Uang Jujur & Sesan

a. Uang Jujur

1) Pengertian Uang Jujur

Uang jujur merupakan uang pemberian pihak laki-laki kepada pihak perempuan pada perkawinan jujur. Perkawinan jujur sendiri merupakan bentuk perkawinan di mana pihak laki-laki memberikan uang jujur kepada pihak perempuan. Benda yang dapat dijadikan sebagai jujur biasanya benda-benda yang memiliki kekuatan magis. Pemberian jujur diwajibkan dalam rangka mengembalikan keseimbangan magis yang menjadi goyah karena terjadinya kekosongan pada keluarga perempuan yang pergi karena pernikahan tersebut.

Perkawinan jujur dapat dijumpai pada masyarakat *patrilineal*, baik murni maupun beralih-alih. Ciri-ciri umum perkawinan jujur adalah *patrilokal*, artinya, istri wajib bertempat tinggal di kediaman suami atau keluarga suami. Akan tetapi hal itu tidak berarti bahwa semua perkawinan *patrilokal* adalah kawin jujur, karena adakalanya pada perkawinan lainnya istri juga wajib tinggal di tempat kediaman suami. Di samping itu, perkawinan jenis ini bersifat eksogam, yaitu suatu larangan menikah dengan warga yang sekalan atau semarga. Masyarakat yang masih ketat menjalankan perkawinan jujur adalah masyarakat Tapanuli, dengan menambah ciri lagi yaitu simetri konubium yang merupakan larangan perkawinan timbal balik antara dua keluarga.⁵⁹

⁵⁸ Gatot Suparmono, *Loc.Cit.* h. 46.

⁵⁹ Wignjodipoero Soerojo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung, 1995). h. 128.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan uang jujur adalah harta atau uang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebelum dilaksanakannya akad perkawinan. Uang jujur ini merupakan syarat sah dalam perkawinan. Uang jujur ini muncul karena adanya perkawinan jujur, yaitu suatu bentuk perkawinan yang bertujuan untuk meneruskan garis keturunan dari pihak laki-laki (ayah). Dalam perkawinan semacam ini pihak laki-laki harus menyerahkan sesuatu sebagai jujur.

2) Fungsi dan Tujuan Uang Jujur Menurut Adat

Jujur atau *jojokh* merupakan pemberian pertama seorang calon suami kepada calon istrinya sebelum akad nikah dilaksanakan. Dikatakan yang pertama karena sesudah itu akan timbul beberapa kewajiban materiil yang harus dilaksanakan oleh suami selama masa perkawinan untuk kelangsungan hidup perkawinan itu.

Pemberian uang jujur atau *jojokh* dalam perkawinan adat diwajibkan atas calon suami kepada calon istri. Pemberian ini merupakan salah satu syarat dari sahnya suatu perkawinan menurut adat. Apabila uang jujur atau *jojokh* ini tidak diberikan oleh laki-laki kepada perempuan maka perkawinan yang telah direncanakan bisa batal. Pemberian itu haruslah sesuai dengan apa yang telah disepakati kedua belah pihak (calon suami dan calon istri).

Menurut ketentuan perkawinan adat, pemberian uang jujur adalah pemberian pria kepada wanita sebagai pemberian wajib, bukan sebagai pembelian atau ganti rugi. Selain itu, fungsi dan tujuan uang jujur ini pada dasarnya adalah untuk memperkuat hubungan dan menumbuhkan tali kasih sayang dan saling cinta-mencintai antara suami dan istri.

Selain itu, adanya pemberian uang jujur ini mempunyai fungsi dan tujuan yaitu sebagai berikut:

- a) Secara yuridis untuk mengubah status keanggotaan klanpengantin perempuan.
- b) Secara ekonomis membawa pergeseran dalam kekayaan.
- c) Secara sosial tindakan penyerahan jujur itu mempunyai kedudukan yang dihormati.⁶⁰

Menurut Rumasta Simalango dan Yusna Melianti, pemberian uang jujur merupakan hal yang sangat penting dalam perkawinan adat. Hal ini disebabkan karena syarat sahnya suatu perkawinan adat yaitu dengan adanya pemberian uang jujur. Tanpa pemberian uang jujur suatu perkawinan tidak sah menurut adat, karena fungsi dan tujuan uang jujur dalam perkawinan adat adalah untuk menjaga keseimbangan keluarga si perempuan karena anggota keluarganya sudah berkurang dan sebagai syarat sahnya suatu perkawinan.⁶¹

Pemberian uang jujur dalam perkawinan adat bukan untuk mencari keuntungan. Hal ini dikarenakan uang jujur yang diterima dari pihak laki-laki akan digunakan untuk membeli hal-hal yang berhubungan dengan pesta perkawinan. Bahkan tidak sedikit pihak perempuan mengalami kerugian karena uang jujur yang mereka terima tidak seimbang dengan yang mereka berikan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa fungsi dan tujuan uang jujur dalam perkawinan adat untuk menjaga keseimbangan keluarga si perempuan karena anggota keluarganya berkurang, maka untuk mengimbangnya diberikanlah uang jujur; sebagai syarat sahnya suatu perkawinan menurut adat; untuk dapat menjalin kekerabatan antara kedua belah pihak, dan supaya si istri apabila sudah menjanda dapat

⁶⁰ Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Penerbit Tarsito, 1996). h. 124.

⁶¹ Rumasta Simalango dan Yusna Melianti, *Fungsi Uang Jujur (sinamot) pada Perkawinan menurut Adat Masyarakat Batak Toba di Desa Sabungan Huta Kecamatan Ronggur Ni Huta Kabupaten Samosir*, JUPIIS 3, 2011. h. 32-33.

menerima bantuan dari keluarganya atau saudara laki-laki.⁶²

3) Tata Cara Pemberian Uang Jujur Menurut Adat

Dalam perkawinan adat, pihak yang terlibat saat pemberian uang jujur ini ada dua, yaitu calon pengantin laki-laki beserta keluarga dan pihak calon mempelai wanita beserta keluarganya. Biasanya diantara mereka ada perantara yang mengerti adat yang akan saling bercakapdalam bahasa adat, yang isinya menyampaikan maksud kedatangan keluarga tersebut.

Pada momen ini, kedua belah pihak menyepakati jumlah atau besarnya uang jujur. Menurut hukum adat, tidak ada batasan uang jujur ini. Namun dalam realitanya, jumlah uang jujur harus tinggi supaya kedua belah pihak saling puas atau setidaknya pihak perempuan jangan dirugikan atau melalui uang jujur ini pihak perempuan akan ditinggikan derajatnya. Uang jujur ini oleh pihak perempuan pada umumnya digunakan untuk acara pesta yang akan diadakan dan biaya-biaya lain untuk membeli perlengkapan rumah tangga bagi pasangan baru tersebut. Di sini terlihat bahwa uang jujur bukan untuk mencari keuntungan.⁶³

Di kalangan masyarakat adat yang susunannya *patrilineal*, dengan diterimanya uang jujur oleh pihak wanita berarti setelah perkawinan si wanita akan mengalihkan kedudukannya dari keanggotaan kerabat suami untuk selama ia mengikatkan dirinya dalam perkawinan itu, atau sebagaimana berlaku di daerah Batak dan Lampung untuk selama hidupnya. Dengan diterimanya uang atau barang jujur, berarti si perempuan mengikatkan dirinya pada perjanjian untuk ikut di pihak suami. Pribadi istri maupun harta benda yang dibawa tunduk kepada hukum adat suami, kecuali ada ketentuan lain yang menyangkut barang-barang istri tertentu. Setelah istri berada ditangan suami, maka istri dalam segala

⁶² *Ibid.* h.39.

⁶³ *Ibid.* h. 39.

perbuatan hukumnya harus berdasarkan persetujuan suami atau atas nama suami atau atas persetujuan kerabat suami. Istri tidak boleh bertindak sendiri, karena ia adalah pembantu suami dalam mengatur kehidupan rumah tangga, baik dalam hubungan kekerabatan maupun hubungan kemasyarakatan.⁶⁴

Bentuk perkawinan jujur dengan pembayaran uang jujur dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan harus diikuti dengan pemberian barang bawaan oleh pihak perempuan yang dibawa mempelai perempuan pada saat pernikahan. Barang bawaan tersebut pada masyarakat Lampung Pepadun disebut dengan *sesan*, sedangkan Lampung Pesisir disebut dengan *benatok*. Barang bawaan ini pada umumnya berupa perlengkapan isi rumah, misalnya: meja-kursi tamu, meja-kursi makan, lemari pakaian, tempat tidur, meja rias, dan lainnya.

Di kalangan masyarakat adat yang menganut sistem perkawinan jujur dan menarik garis keturunan berdasarkan hukum kebapakan, setiap anak wanita akan menganggap dirinya anak orang lain dikarenakan sejak kecil hingga dewasa anak wanita disiapkan untuk menjadi anak orang lain dan menjadi warga adat orang lain. Tetapi bukan berarti hubungan hukum dan hubungan biologis antara si wanita dengan orangtua kerabat asalnya hilang sama sekali, hanya saja tugas dan peranannya sudah berlainan. Ia harus lebih mengutamakan kepentingan kerabat pihak suaminya daripada kepentingan kerabat asalnya.

b. *Sesan*

Sesan adalah barang bawaan yang di bawa saat berlangsungnya perkawinan dari mempelai wanita (yang berupa benda alat-alat rumah tangga, perhiasan dan sebagainya).

Dalam hal barang atau harta bawaan antara suami dan istri, pada dasarnya tidak ada percampuran antara keduanya (harta suami dan

⁶⁴ Hadikusuma Hilman, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2003). h. 73.

harta istri) karena perkawinan. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya. Demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya. Harta atau barang bawaan dari kedua belah pihak serta harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan hal ini dalam perjanjian perkawinan.⁶⁵

Tetapi Dilingkungan masyarakat Lampung Pepadun pada umumnya dari pihak perempuanlah yang menyediakan perabotan-perabotan rumah tangga untuk bekal kedua mempelai memasuki jenjang perkawinan, pihak istri membawa harta bawaan(*sesan*) ketempat suami karena ikatan perkawinan jujur yang biasa berlaku dalam kekerabatan patrilineal dalam masyarakat Lampung Pepadun. Umumnya bawaan istri yang sering disebut dengan *sesan* atau *sansan* itu tidak terdiri dari barang-barang tetap seperti tanah atau bangunan tetapi *sesan* itu terdiri dari barang-barang bergerak seperti pakaian, perhiasan ,ranjang kasur lengkap, perabotan rumah tangga dan peralatan dapur. Barang bawaan (*sesan*) ini dibawa ketika upacara perkawinan yang diserahkan oleh kepala kerabat mempelai wanita kepada kepala kerabat mempelai pria yang mewakili untuk menerima *sesan* tersebut, dikuasai dan dimiliki serta digunakan bagi kehidupan rumah tangga baru yang akan mereka jalani kedepannya.

Menurut hukum adat Lampung Pepadun jika anak wanita yang akan memasuki jenjang pernikahan dimana semua anggota kerabat mempelai wanita berkewajiban untuk memberi bekal barang bawaan (*sesan*) yang akan dibawa ketempat suami. Diantara pemberian bekal ini ada kemungkinan bahwa barang-barangnya belum disampaikan ketika perkawinan berlangsung, tetapi ditangguhkan penyampaiannya dan masih ditinggal dirumah orangtua wanita atau baru berupa janji

⁶⁵ Aminuddin Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: CV Pusaka Setia, 1999). h. 181

yang kemudian baru akan dipenuhi dan disampaikan setelah kedua mempelai hidup sebagai suami istri.

Sesan yang diberikan kerabat untuk mempelai wanita dapat berupa harta tetap, rumah atau tanah pekarangan dan lain-lain atau hanya berupa perabotan rumah tangga yang belum disampaikan ketika saat perkawinan berlangsung.⁶⁶

Pemberian anggota kerabat kepada suatu keluarga suami istri baru karena cinta kasih, tolong menolong atau karena jasa mungkin terjadi diantar yang mampu memberi yang tidak mampu. Misalnya pihak anggota kerabat yang mampu memberikan bidang tanah usaha kepada keluarga baru yang belum mempunyai mata pencaharian tertentu. Apabila pemberian itu ditujukan bagi satu keluarga suami istri, maka harta pemberian itu digolongkan bersama, tetapi jika ditujukan kepada si suami sendiri atau si istri sendiri maka tergolong sebagai tambahan harta bawaan atau harta hasil pencaharian masing-masing.⁶⁷

B. Perceraian (Talak) Dan Gugat (Khulu') Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Perceraian (Talak) dalam Hukum Islam

Talak menurut istilah fikih ialah melepaskan atau membatalkan ikatan pernikahan dengan lafaz tertentu yang mengandung arti menceraikan.⁶⁸

Talak merupakan jalan keluar terakhir dalam suatu ikatan pernikahan antara suami istri jika mereka tidak terdapat lagi kecocokan dalam membina rumah tangga.

⁶⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003). h. 55.

⁶⁷ *Ibid.* h. 56.

⁶⁸ Amir Syarifuddin, *Loc.Cit.* h. 198.

Talak sering disebut juga dengan istilah perceraian dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-ṭalâq*, secara etimologi berarti:

الطَّلَاقُ وَهُوَ لُغَةً حَلُّ الْقَيْدِ

“Talak secara bahasa adalah melepaskan tali.”

Dalam istilah umum, perceraian adalah putusnya hubungan atau ikatan perkawinan antara seorang pria dengan wanita (suami-istri), sedangkan dalam syari’at Islam, perceraian disebut dengan talak yang maksudnya adalah pelepasan atau pembebasan suami terhadap istrinya; sedangkan dalam fikih Islam, perceraian berarti bercerai lawan dari berkumpul yang berarti perceraian antara suami istri.⁶⁹

Menurut ‘Abd al-Rahman al-Jaziri:⁷⁰



Perceraian dalam pengertian ini adalah, hilangnya ikatan atau membatasi geraknya dengan kata-kata khusus, sedangkan maknanya (إزالة) adalah hilangnya ikatan perkawinan sehingga tidak halal lagi suami istri bercampur dengan istri.

⁶⁹ Kamal Mukhtar, *Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993). h. 6.

⁷⁰ Abd al-Rahman Al-Jaziri, *al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-Arba’ah*, (Mesir: Dâr al-Fikr, 1989). h. 278.

Allah swt., menjelaskan:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُخْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

*“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) ‘iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu ‘iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.”*⁷¹

Meskipun talak dibolehkan dalam agama, namun talak merupakan hal dibenci oleh Allah swt., maka apapun perkara yang mendatangkan perceraian, hendaklah ia berpikir kembali untuk *islah*, sehingga Allah swt., memberikan masa iddah untuk berpikir kembali, dan merujuknya kembali sebelum masa habis masa iddah.

Sebagaimana firman Allah swt., dalam al-Qur’an:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

⁷¹ Departemen Agama RI, *Loc.Cit.* h. 1276

“Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar.”⁷²

Begitu juga dengan firman Allah swt ., lainnya:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنِ أَجَلَهُنَّ فَأُمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma’ruf atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma’ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al Hikmah (as-Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”⁷³

⁷² Ibid. h. 1276.

⁷³ Ibid. h. 19.

Allah swt., menjelaskan bahwa seorang suami yang menjatuhkan cerai kepada istrinya hendaklah tidak menganiaya istrinya dengan cara mengupayakan agar istrinya tersebut berada dalam masa ‘iddah⁷⁴ yang panjang. Ayat tersebut di atas merupakan kritikan keras terhadap kasus yang dipraktekkan oleh Sabit Ibnu Basyar, seorang laki-laki dari golongan Anṣar, dimana ia menjatuhkan cerai istrinya namun ketika masa ‘iddah-nya tinggal dua atau tiga hari lagi, lalu ia rujuk kepada istrinya, kemudian ia kembali menjatuhkan talak istrinya untuk yang kedua dan begitu seterusnya sehingga istrinya tersebut selalu berada dalam masa ‘iddah selama sembilan bulan, dengan maksud menganiayanya. Demikian *asbâb al-nuzûl* ayat tersebut menurut Syaikh Ali Sayis.⁷⁵

Rasulullah Muhammad saw., juga memberikan penegasan bahwa meskipun cerai diperbolehkan akan tetapi ia merupakan sesuatu yang dibenci oleh Allah swt:

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُيَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ
ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ⁷⁶

“Menyampaikan kepada kami Kasir bin ‘Ubaid, Muhammad bin Khalid dari Mu’arrif bin Wasil dari Muharib bin Disar dari Ibn ‘Umar dari Nabi saw bersabda: Perbuatan halal yang dibenci oleh Allah swt adalah perceraian.”

Al-Qur’an selain menerangkan tentang perceraian, juga memberikan kesempatan untuk berpikir ulang pasca ungkapan cerai terlontar, berupa *ruju’* atau kembali bersatu, sebagaimana Allah berfirman:

⁷⁴ *Iddah* adalah masa waktu terhitung di mana wanita menunggu untuk mengetahui kosongnya rahim, yang diperoleh dengan kelahiran, atau dengan hitungan bulan atau dengan perhitungan *quru’*. Lihat Taqi ad-Din Abu Bakr bni Muhammad al-Husaini ad-Damsyiqi asy-Syafi’i, *Kifayah al-Akhyar*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th), h. 391

⁷⁵ Muhammad ‘Ali Al-Sayis, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, n.d.). h. 154

⁷⁶ Sulaiman ibn al-Asy’as Abu Daud Al-Sajistani, *Sunan Abi Daud*, Juz I (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.). h. 661.

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ حِفْظُهُمَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.”⁷⁷

a. Rukun dan syarat Talak

Terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai penetapan rukun talak. Menurut ulama Hanafiyyah, rukun talak itu adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Kasani sebagai berikut:

فر كن الطلاق هو اللفظ الذي جعل دلالة على معنى الطلاق لغة وهو التخلية

ولإر سال ورفع القيد الصريح وقطع الوصلة ونحوه في الكناية أو شرعا وهو إر

الة حل المحلية في النوا عین أو ما یقوم مقام اللفظ⁷⁸

“Rukun talak adalah lafal yang menjadi penunjukan terhadap makna talak, baik secara etimologi yaitu at-takhliyyah (meninggalkan atau membiarkan), al-irsal (mengutus) dan raf’u al-Qayyid (mengangkat ikatan) dalam kategori lafal-lafal lainnya pada lafal kinayah, atau

⁷⁷ Departemen Agama RI, *Loc.Cit.* h. 19.

⁷⁸ Ala’ ad-Din Abi Bakr Ibn Mas’ud Al-Kasani, , *Bada’i wa al-Sana’i*, Juz III (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, n.d.). h.98.

secara syara' yakni menghilangkan halalnya "bersenang-senang dengan isteri dalam kedua bentuknya (raj'i dan ba'in), atau apapun yang menempati posisi lafal."

Menurut ulama dalam mazhab Malikiyyah, rukun talak itu ada empat, yaitu:

- 1) Orang yang berkompeten melakukannya. Maksudnya, orang yang menjatuhkan talak itu adalah suami atau wakilnya (kuasa hukumnya) ataupun wali, jika ia masih kecil.
- 2) Dilakukan secara sengaja. Maksudnya, orang yang menjatuhkan talak itu sengaja membacakan lafal-lafal yang termasuk kategori lafal sharih atau lafal kinayah yang jelas.
- 3) Istri yang dihalalkan. Maksudnya talak yang dijatuhkan itu mesti terhadap isteri yang telah dimiliki melalui suatu pernikahan yang sah.
- 4) Adanya lafal, baik bersifat sharih ataupun termasuk kategori lafal kinayah.⁷⁹

Adapun menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabillah, rukun talak itu ada lima, yaitu:

- 1) Orang yang menjatuhkan talak. Orang yang menjatuhkan talak itu hendaklah seorang *mukallaf*. Oleh karena itu, talak anak kecil yang belum baligh dan talak orang gila tidak mempunyai kekuatan hukum.
- 2) Lafal talak. Mengenai rukun yang kedua ini, para ulama Syafi'iyah membaginya kepada tiga macam, yaitu;
 - a) Lafal yang diucapkan secara sharih dan kinayah. Diantara yang termasuk lafal sharih adalah *al-sarrah*, *al-firaq*, *al-thalaq* dan setiap kata yang terambil dari lafal *al-thalaq* tersebut. Sedangkan lafal kinayah adalah setiap lafal yang memiliki beberapa pengertian, seperti seorang suami berkata kepada isterinya: *idzhabi* (pergilah kamu) atau *ukhruji* (keluarlah kamu) dan lafal-

⁷⁹Menurut Ibn Jauza (ulama Malikiyah), rukun talak ada tiga, yaitu *al-mut'alliq* (suami), *al-mutallaqah* (isteri), dan *as-sigah* (lafal atau yang menempatinnya secara hukum), Lihat Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), Cet. Ke-3, Juz. 7, h. 361-362

lafal lain seperti itu, sementara suami itu meniatkan menjatuhkan talaknya. Jadi menurut mereka, talak yang dijatuhkan oleh seorang suami itu baru terakad apabila diucapkan dengan lafal-lafal yang sharih ataupun lafal kinayah dengan meniatkannya untuk menjatuhkan talak.

- b) Apabila lafal talak itu tidak diucapkan, baik secara sharih maupun kinayah, boleh saja melalui isyarat yang dipahami bermakna talak, namun menurut kesepakatan ulama dikalangan Syafi'iyah, isyarat tersebut baru dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila dilakukan oleh orang bisu. Menurut mereka isyarat tersebut juga terbagi kepada sharih dan kinayah. Isyarat sharih adalah isyarat yang dapat dipahami oleh orang banyak, sementara isyarat yang termasuk kategori kinayah adalah isyarat yang hanya dipahami oleh sebagian orang. Penetapan dapatnya isyarat itu menggantikan kedudukan lafal, sesuai dengan kaidah fihiyyah yang berbunyi:

⁸⁰ الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان

“Isyarat yang biasanya dapat dipahami sama kedudukannya dengan penjelasan melalui lisan bagi orang-orang bisu.”

- c) Talak itu juga sudah dianggap memenuhi rukun kedua ini, apabila suami tersebut menyerahkan (*al-fawiq*) kepada isterinya untuk menjatuhkan talaknya. Misalanya seorang suami berkata kepada isterinya: *Talliqli nafsak* (talaklah dirimu), lalu apabila isterinya itu menjawab: *Tallaqtu* (aku talakkan), maka talak isterinya itu telah jatuh. Sebab dalam kasus seperti itu, istri berkedudukan sebagai tamlik (wakil) dalam menjatuhkan talak.

Menurut pandangan ulama Syafi'iyah, lafal atau sighth yang merupakan salah satu rukun talak itu dapat terpenuhi melalui ucapan

⁸⁰ Muhammad Al-Zarqa, *Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, Cet Ke-4 (Damaskus: Dar al-Qalam, 1996). h. 351.

dengan lafal yang sharih atau kinayah, isyarat bagi orang yang bisu baik dengan isyarat yang sharih maupun kinayah, ataupun melalui penyerahan menjatuhkan talak yang dikuasakan oleh seorang suami kepada isterinya.

3) Dilakukan secara sengaja; maksudnya, lafal talak itu sengaja diucapkan. Ulama Syafi'iyah mengemukakan bahwa ada lima bentuk yang diketahui cacatnya kesengajaan, yaitu:

a) Salah ucapan; misalnya, seorang suami yang isterinya bernama Thariq, lalu ia memanggilnya dengan ucapan: *Ya Taliq* (wahai yang ditalak). Kemudian suami tersebut mengatakan bahwa lidahnya terpeleset (salah ucapan) maka talaknya tidak sah. Jadi apabila seorang suami tersalah ucapannya sehingga kata yang keluar itu adalah kata talak atau lafal-lafal yang secara sharih bermakna talak, maka talaknya dianggap tidak sah.

b) Ketidaktahuan; apabila seorang suami mengatakan: "Hai wanita yang ditalak" kepada seorang wanita yang disangkanya isteri orang lain namun ternyata wanita itu adalah isterinya sendiri, maka menurut pendapat Jumhur ulama Syafi'iyah talaknya sah; namun apabila orang '*ajam* (non arab) mengucapkan lafal talak, sementara ia tidak memahami maksudnya maka talak itu tidak sah.

c) Bersenda gurau; talak yang dijatuhkan dalam keadaan bersenda gurau tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana ketentuan yang berlaku pada seluruh bentuk akad lainnya

d) Adanya unsur paksaan; adanya unsur keterpaksaan dapat menghalangi keabsahan seluruh bentuk tasharruf kecuali mengislamkan kafir harbidan murtad. Oleh karena itu, talak yang dijatuhkan oleh seorang suami dalam keadaan terpaksa tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, namun menurut pendapat terkuat, unsur paksaan yang menjadikan talak itu tidak diakui

keabsahannya hanya unsur paksaan yang termasuk kategori keterpaksaan absolute seperti ancama bunuh dan lenyapnya harta, bukan keterpaksaan relative seperti dikurung atau tidak diberi makanan. Ketentuan tersebut berdasarkan kepada Hadis Nabi Saw berikut:

عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع عن أمتي الخطأ

والنسيان وما استكرهوا عليه⁸¹

“Diterima dari Ibnu Abbas r.a dari Nabi Saw bahwa ia bersabda: Sesungguhnya Allah Swt mengangkat dari umatku dari sifat tersalah, lupa dan apa saja yang dipaksakan kepadanya.”

- e) Hilang akal pikiran disebabkan gila dan minum obat; Gilanya seseorang dapat menghalangi keabsahan dari seluruh bentuk *tasaruf*. Ketentuan tersebut didasarkan kepada hadis Nabi saw:

عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع

القلم عن ثلاثة عن التائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن

المجنون حتى يعقل أو يفيق

“Diterima dari Aisyah r.a., dari Nabi saw bahwa ia bersabda; Dibebaskan dari tiga macam orang, yaitu dari orang yang tidur hingga ia bangun, dari anak kecil hingga dewasa dan dari orang gila hingga ia ingat atau sadar.”⁸²

- 4) Wanita yang dihalalkan atau isteri. Apabila seorang suami menyandarkan talak itu kepada bagian dari tubuh istrinya, misalnya ia

⁸¹(HR. Ibnu Majah dan al-Hakim). Muhammad Ibn Isma'il al-Kahlani, *Subul al-Salam; Syarh Bulug al-Maram min Adillah al-Ahkam*, (Bandung: Dahlan, t.th.), h. 176; Lihat juga: Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi, *Sunan Ibn Majah*, (Beirut: al-Maktabah al-'Ilmiyyah, t.th.), Jil. 1, h. 659

⁸²(H.R. Ahmad dan al-Arba'ah kecuali al-Tirmidzi. Hadis ini dianggap sahih oleh al-Hakim dan juga diriwayatkan oleh Ibn Hibban) Lihat Al-Kahlani, *Ibid.*, h. 180-181; Lihat juga, al-Baqi, *Ibid.*, h. 658

menyandarkan kepada anggota tubuh tertentu seperti tangan, kepala, limpa atau hati, maka talaknya sah. Namun apabila suami tersebut menyandarkan kepada fadhilat tubuhnya seperti air liur, air susu atau air mani, maka talaknya tidak sah.

- 5) Menguasai isteri tersebut. Apabila seorang suami berkata kepada seorang wanita yang bukan isterinya; *anti talliq* (kamu wanita yang ditalak), maka talaknya tidak sah, namun apabila suami tersebut berkata kepada isterinya atau isterinya itu masih berada dalam masa 'iddah talak raj'i, maka talaknya baru dianggap sah. Bahkan menurut ulama Syafi'iyah, apabila seorang suami berkata kepada wanita yang bukan isterinya; *In nakahtuki fa anti talliq* (jika aku menikahimu maka kamu adalah wanita yang ditalak), maka nikahnya juga tidak sah. Jadi menurut mereka, ucapan yang dikaitkan dengan syaratpun juga tidak sah, sebab ketika ia mengucapkannya, wanita tersebut tidak berada dalam kekuasaannya.⁸³

b. Macam-Macam Talak

Berdasarkan penjelasan di atas, maka secara fiqhiyyah implikasi yuridis dari adanya talak memunculkan beberapa macam talak, yakni:

1. Talak Raj'i

Talak *raj'i*, yaitu talak dimana suami masih mempunyai hak untuk merujuk kembali isterinya.

2. Talak Bain

Talak bain adalah talak yang memisahkan sama sekali hubungan suami isteri. Talak bain terbagi menjadi dua bagian:

- a) Talak *bain sugra*, ialah talak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru kepada isteri bekas isterinya itu. Talak yang dijatuhkan suaminya pada isteri yang belum terjadi *dukhul* (setubuh) adanya *Khulu'*

⁸³ Muhammad bin Muhammad Abi Hamid al-Gazali, *al-Wajiz fi Fiqh Mazhab al-Imam al-Syafi'i*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 286-289. Lihat juga: as-Sayyid Abi Bakr, *I'annah at-Talibin*, (Beirut: Dar Ihya' at-Turas al-'Arabi, t.th.), Jil. 4, h. 2

Hukum talak *bain şugra*;

- 1) Hilangnya ikatan nikah antara suami dan isteri
- 2) Hilangnya hak bergaul bagi suami isteri termasuk berkhawat (menyendiri berdua-duaan)
- 3) Masing-masing tidak saling mewarisi manakala meninggal
- 4) Bekas isteri, dalam masa iddah, berhak tinggal di rumah suaminya dengan berpisah tempat tidur dan mendapat nafkah
- 5) Rujuk dengan akad dan mahar yang baru

b) Talak *Bain Kubra*

Bain kubra adalah talak yang mengakibatkan hilangnya hak rujuk pada bekas isteri, walaupun kedua bekas suami istri itu ingin melakukannya, baik diwaktu iddah atau sesudahnya. Adapun yang termasuk talak bain kubra adalah segala macam talak yang mengandung unsur-unsur sumpah. Hukum talak bain kubra:

- 1) Sama dengan hukum talak *bain şugra* nomor 1, 2, dan 4
- 2) Suami haram kawin lagi dengan istrinya, kecuali bekas istri telah kawin dengan laki-laki lain, dan telah diceraikan oleh laki-laki yang mengawininya.

2. Cerai Gugat (khulu') dalam Hukum Islam

Menurut bahasa, kata cerai gugat adalah istilah bahasa Indonesia yang sering dikenal dengan istilah *khulu'* berasal dari *khala'ats-tsauba idzaa azzalaba* yang artinya melepaskan pakaian; karena istri adalah pakaian suami dan suami adalah pakaian istri. *Khulu'* menurut bahasa, dari kata خَلَعَ - يَخْلَعُ - خُلْعًا yang berarti melepaskan atau menanggalkan pakaian,⁸⁴ atau يَمْعِي خَلَعَ الشَّيْءُ خُلْعًا yang berarti menanggalkan ia akan sesuatu.⁸⁵ Sedangkan

⁸⁴ A.W. Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, Cet 14 (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997). h. 361.

⁸⁵ Idris Al-Marbawi, *Kamus Bahasa Arab Melayu*, Jilid I (Surabaya: Hidayah, 2000). h. 184.

menurut istilah, adalah menebus istri akan dirinya kepada suaminya dengan hartanya maka tertalakhlah dirinya.⁸⁶

Abu Zahrah mendefinisikan bahwa khulu' mempunyai dua arti yaitu 'am dan khas. *Khulu'* dalam arti umum adalah talak atas harta istri untuk menebus dirinya yang diserahkan kepada suaminya baik dengan lafaz khulu' atau lafaz *mubara'ah* atau dengan lafaz talak; pengertian ini banyak digunakan oleh ulama kontemporer. Adapun khulu' dalam arti khas adalah talak tebus dengan lafaz *khulu'*, pendapat ini banyak digunakan oleh ulama salaf.⁸⁷

Secara terminologi, menurut syariat, khuluk ialah pengajuan talak oleh istri : sebagaimana diungkapkan oleh Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha :

“Khuluk ialah talak yang dijatuhkan sebab keinginan dan desakan dari pihak istri, hal semacam itu disyariatkan dengan jalan khuluk, yakni pihak istri menyanggupi membayar seharga kesepakatan antara dirinya dengan suami, dengan (standar) mengikuti mahar yang telah diberikan.”⁸⁸

Dari pemaparan tersebut bisa kita pahami bahwa khulu' secara syariat hukumnya boleh diajukan jika memenuhi persyaratan. Selain itu, dalam khulu' harus terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, suami maupun istri tentang nominal tebusan. Kesepakatan ini sekaligus menunjukkan bahwa dalam akad khulu', harus ada kerelaan dari pihak suami untuk menerima tebusan, dan kesanggupan dari pihak istri untuk membayar tebusan tersebut. Namun dengan catatan, nominal harga tebusan tidak boleh melebihi nominal mas kawin pada saat pernikahan.

⁸⁶ Abu Mansur, , *Lisan el-Arab*, Jilid 3 (Kairo: Daar el-Hadis, 2003). h. 182.

⁸⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Ahwal Syahkshiyah*, (Kairo: Daar el-Fikri, 2005). h. 329.

⁸⁸ Mustafa al-Khin dan Musthafa Al-Bugha, *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syâfi'i*, Juz IV (Surabaya: Al-Fithrah, 2000). h. 127.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adji, Sution Usman. *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama* Cet. II. Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Al-Bugha, Mustafa al-Khin dan Musthafa. *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syâfi 'i* Juz IV. Surabaya: Al-Fithrah, 2000.
- Al-Jaziri, Abd al-Rahman. *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*. Mesir: Dâr al-Fikr, 1989.
- Al-Kasani, Ala' ad-Din Abi Bakr Ibn Mas'ud. , *Bada'i wa al-Sana'i* Juz III. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, n.d.
- Al-Marbawi, Idris. *Kamus Bahasa Arab Melayu* Jilid I. Surabaya: Hidayah, 2000.
- Al-Sajistani, Sulaiman ibn al-Asy'as Abu Daud. *Sunan Abi Daud* Juz I. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- Al-Sayis, Muhammad 'Ali. *Tafsir Ayat al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, n.d.
- Al-Zarqa, Muhammad. *Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah* Cet Ke-4. Damaskus: Dar al-Qalam, 1996.
- Asmin, Yudian W. *Maqasid al-Syari'ah sebagai Doktrin dan Metode*. Jurnal Al-jami'ah No. 58, 1995.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid I. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Cholid Narbuko, dan Abu Ahmani. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- . *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- . *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata (tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Hasan, Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia IKAPI, 2002.
- Hasan, M.Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

- Hilman Hadikusuma. *Hukum Waris Adat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Jamalludin, Wan. *Pedoman Penulisan Proposal Dan Tesis*. Bandar Lampung, 2010.
- Jaya, Asafri. ““ Konsep Maqashid syari’ah “ Menurut al-Syathibi”. 1996.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Alumni, 1986.
- Lapidus, Ira. M. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri. *Penelitian Hukum Normatif* Cetakan ke. Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Mansur, Abu. , *Lisan el-Arab* Jilid 3. Kairo: Daar el-Hadis, 2003.
- Marzuki, Peter Muhammad. *Penelitian Hukum*,. Jakarta: Kencana, 2009.
- Melianti, Rumasta Simalango dan Yusna. *Fungsi Uang Jujur (sinamot) pada Perkawinan menurut Adat Masyarakat Batak Toba di Desa Sabungan Huta Kecamatan Ronggur Ni Huta Kabupaten Samosir* JUPIIS 3,. 2011.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*,. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mukhtar, Kamal. *Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Munawwir, A.W. *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia* Cet 14. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Pohan, R.Soetojo Prawirohadmijojo Dan Marthalena. *Sejarah Perkembangan Hukum Perceraian di Indonesia dan Belanda*. Surabaya: Airlangga University, 1996.
- Ramulyo, Moh.Idris. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, Dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Sa, Sabaruddin. *Saibumi Ruwa Jurai Lampung Pepadun dan Saibatin*. Jakarta: Buletin Waylima Manjau, 2012.
- Saragih, Djaren. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Penerbit Tarsito, 1996.
- Slamet Abidin, Aminuddin. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV Pusaka Setia, 1999.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*. Jakarta: Liberty, 2007.
- Soerojo, Wignjodipoero. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung, 1995.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

-----, *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Cet. I. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Suparmono, Gatot. *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*. Jakarta: Djambatan, 1998.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang- Undang Perkawinan* Edisi I Ce. Jakarta: Prenada Media, 2006.

T.Erwin, Elise T.Sulistini dan Rudi. *Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara-Perkara Perdata* Cet. II. Jakarta: Bina Aksara, 1978.

Wiratha, Made. *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Sekripsi Dan Tesis*. Yogyakarta: Andi, 2006.

Zahrah, Muhammad Abu. *Ahwal Syahkshiyah*. Kairo: Daar el-Fikri, 2005.

Zuhraeni. *Sistem Perkawinan Adat Lampung* Cetakan I. Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah, 2006.

B. Dasar Hukum

1. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al qur'an dan Terjemah*, (Semarang : CV.Toha Putra, 1989).

2. Hukum Positif

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999).

Kompilasi Hukum Islam

C. Sumber Internet

www.lindungikami.Org/.../UU_Nomor_39_tentang_Hak_Asasi_Manusia.pdf

Tesis Moh. Aqil Musthofa , *Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 266/K/AG/2010 tentang Pembagian Harta Bersama Suami isteri*, 2018 <http://digilib.uin-suka.ac.id/33891/> diakses 27 Agustus 2020.

Tesis Hadi Pranoto, *Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Terhadap Harta Perkawinan Menurut Hukum Adat (Study kasus di Pengadilan Negeri Semarang)*, 2005 <http://eprints.undip.ac.id/11512/> diakses 27 Agustus 2020.

Tesis Ahmad Jamluddin Jambunanda, *Perspektif Fiqih Kontemporer Tentang Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Dalam Asas Keadilan (Studi Kasus Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Perkara No. 126/Pdt.G/2013/ PTA.JK)*, 2019 <http://repository.uinbanten.ac.id/4648/> diakses 27 Agustus 2020.